



## KATA PENGANTAR



Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala dan Karunia-Nya, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,. Penyusunan LKjIP ini merupakan salah satu sarana untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2022, sebagai konsekuensi dan konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas.

Disamping itu, penyusunan LKjIP ini juga sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran.

Substansi pokok LKjIP Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 ini memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2022, sekaligus menginformasikan berbagai permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat mendukung terwujudnya visi misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah 2017-2022.

Namun demikian, dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak terdapat kekurangan baik menyangkut format dan substansinya, sehingga kritik dan saran sangat kami harapkan dalam rangka penyempurnaan penyusunan LKjIP dimasa mendatang.

Semoga dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran OPD dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mampu menunjukkan kinerjanya secara lebih nyata sesuai dengan tupoksi serta kewenangan masing-masing.



Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKJIP ini dan semoga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melakukan evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh selama satu tahun kedepan agar tercipta kinerja yang lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya oleh masing-masing OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara lebih sinergis.

Pandan, Maret 2023

**Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH**

**ELFIN ELYAS**



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan suatu keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sejalan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi *kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas*. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan visi, misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah, maka penyusunan LKjIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Dokumen Perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan tahun 2022 yaitu tahun keempat RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. LKjIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan, sebagaimana dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah kepada Presiden, ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil program/kegiatan Tahun 2022.

Penyusunan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaannya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 07 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara RI tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaga Negara RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara tahun 2020 Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; (Lembaran Negara RI tahun 2006, Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);



6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 5).

## 1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintah daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Untuk dapat melaksanakan urusan tersebut dibentuk organisasi perangkat daerah. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan diatur dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan serta Unit Pelaksana Teknis daerah, dengan struktur sebagai berikut :



1. Bupati dan Wakil Bupati;
2. Sekretariat Daerah;
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Inspektorat Daerah Kabupaten;
5. Asisten terdiri dari :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membidangi :
    - Bagian Tata Pemerintahan;
    - Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan membidangi :
    - Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
    - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
  - c. Asisten Administrasi Umum membidangi:
    - Bagian Umum;
    - Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana;
    - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
6. Staf Ahli terdiri dari :
  - Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - Bidang Kemasyarakatan dan Sosial.
7. Dinas Daerah terdiri dari :
  - Dinas Kesehatan;
  - Dinas Sosial;
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Satuan Polisi Pamong Praja;
  - Dinas Pariwisata;
  - Dinas Pertanian;
  - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - Dinas Pendidikan;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
  - Dinas Ketenagakerjaan;
  - Dinas Ketahanan Pangan;
  - Dinas Lingkungan Hidup;
  - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - Dinas Perhubungan;
  - Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - Dinas Perpustakaan dan Arsip;
  - Dinas Kelautan dan Perikanan;
8. Badan Daerah terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - b. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



9. Lembaga lain Daerah terdiri dari :
  - a. UPTP Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
  - b. UPTD Puskesmas Saragih di Kecamatan Manduamas;
  - c. UPTD Puskesmas Manduamas di Kecamatan Manduamas;
  - d. UPTD Puskesmas Sirandorung di Kecamatan Sirandorung;
  - e. UPTD Puskesmas Andam Dewi di Kecamatan Andam Dewi;
  - f. UPTD Puskesmas Barus Utara di Kecamatan Barus Utara;
  - g. UPTD Puskesmas Barus Kecamatan di Barus;
  - h. UPTD Puskesmas Siantar Ca di Kecamatan Sosor Gadong;
  - i. UPTD Puskesmas Pasaribu Tobing di Kecamatan Pasaribu Tobing;
  - j. UPTD Puskesmas Sipea pea di Kecamatan Sorkam Barat;
  - k. UPTD Puskesmas Gonting Mahe di Kecamatan Sorkam;
  - l. UPTD Puskesmas Sorkam di Kecamatan Sorkam;
  - m. UPTD Puskesmas Kolang di Kecamatan Kolang;
  - n. UPTD Puskesmas Poriaha di Kecamatan Tapian Nauli;
  - o. UPTD Puskesmas Aek Raison di Kecamatan Sitahuis;
  - p. UPTD Puskesmas Sarudik di Kecamatan Sarudik;
  - q. UPTD Puskesmas Tukka di Kecamatan Tukka;
  - r. UPTD Puskesmas Pandan di Kecamatan Pandan;
  - s. UPTD Puskesmas Kalangan di Kecamatan Pandan;
  - t. UPTD Puskesmas Hutabalang di Kecamatan Badiri;
  - u. UPTD Puskesmas Pinang Sori di Kecamatan Pinang Sori;
  - v. UPTD Puskesmas Lumut di Kecamatan Lumut;
  - w. UPTD Puskesmas Pulo Pakkat di Kecamatan Suka Bangun;
  - x. UPTD Puskesmas Sibabangun di Kecamatan Sibabangun;
  - y. UPTD Puskesmas Kedai Tiga di Kecamatan Barus;
  - z. UPTD Puskesmas Sijungking di Kecamatan Andamdewi.
10. Kecamatan terdiri dari :
  - a. Kecamatan Sukabangun;
  - b. Kecamatan Sibabangun;
  - c. Kecamatan Lumut;
  - d. Kecamatan Pinangsori;
  - e. Kecamatan Badiri;
  - f. Kecamatan Pandan;
  - g. Kecamatan Sarudik;
  - h. Kecamatan Tukka;
  - i. Kecamatan Sitahuis;
  - j. Kecamatan Tapian Nauli;
  - k. Kecamatan Kolang;
  - l. Kecamatan Sorkam;
  - m. Kecamatan Sorkam Barat
  - n. Kecamatan Pasaribu Tobing
  - o. Kecamatan Sosor Gadong
  - p. Kecamatan Barus
  - q. Kecamatan Barus Utara
  - r. Kecamatan Andam Dewi
  - s. Kecamatan Sirandorung
  - t. Kecamatan Manduamas
11. 159 Desa dan 56 Kelurahan.



Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada letak geografis 1<sup>o</sup>11'00"-2<sup>o</sup>22'00" Lintang Utara dan 98<sup>o</sup>07'-98<sup>o</sup>12' Bujur Timur. Dengan berbatasan sebelah utara adalah Provinsi Aceh, sebelah timur adalah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang H

asundutan dan Pakpak Bharat, sebelah selatan adalah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Sebelah Barat adalah Kota Madya Sibolga dan Samudera Indonesia. Dengan total jumlah penduduk perhitungan tahun 2022 adalah sebanyak 365.606 jiwa penduduk.

### 1.3 Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Periode 2017-2022 tidak terlalu jauh berbeda dengan Program prioritas dalam RPJMD sebelumnya, sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara evaluasi, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal, penetapan program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
- c. Program urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Visi yang dirumuskan oleh Kabupaten Tapanuli Tengah menggambarkan prestasi yang diharapkan akan terwujud dalam kurun waktu 2017-2022. Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pencapaian visi tersebut yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera"**. Visi tersebut diwujudkan dengan melaksanakan misi-misi melalui kebijakan-kebijakan yang didukung strategi-strategi yang dirumuskan dalam rangka implementasi Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional.

Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah pada umumnya bekerja sebagai nelayan, petani, peternak, pedagang dan pelaku wisata yang memiliki adat-istiadat dan budaya yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu serta masyarakat yang beragama yang memelihara kerukunan, kebersamaan dan kesetaraan.





Pada RPJMD 2017-2022 Tahun keempat ini, Kabupaten Tapanuli Tengah dirumuskan dengan kebijakan-kebijakan umum dan program pembangunan daerah untuk melaksanakan misi-misi Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mewujudkan visinya tahun 2017-2022. Keseluruhan program untuk mewujudkan ke-10 misi tersebut sebanyak 212 program. Yang terdiri dari urusan wajib sebanyak 129 program, urusan pilihan 41 program dan urusan administrasi sebanyak 42 program.

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan sebelumnya, memperhatikan berbagai kebijakan pembangunan nasional, Provinsi terutama yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, RKP Tahun 2020, RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2018 - 2023 dan, sebagai bentuk keselarasan antar kebijakan pusat, provinsi dan daerah;

1. Presiden Republik Indonesia Masa kerja 2019-2024, telah menyampaikan 5 (lima) Fokus kerja Presiden tahun 2019-2024, yakni :
  - a. Pembangunan Sumber Daya Manusia dengan prioritas utama :
    - Membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
    - Mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
    - Mengoptimalkan kerjasama dengan industri;
    - Penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
  - b. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama :
    - Menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
    - Mempermudah akses ke kawasan wisata;
    - Mendongkrak lapangan kerja baru;
    - Mengakselerasi regulasi dengan prioritas utama.
  - c. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama :
    - Menerbitkan Undang - undang cipta lapangan kerja dan Undang-undang pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ;
    - Merivisi Undang-undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM
  - d. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama :
    - Pemangkasan prosedur dan birokrasi;
    - Penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi;
    - Serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
  - e. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 telah menggariskan bahwa Visi Pembangunan adalah **"Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat"**. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 5 (lima) misi pembangunan daerah, yaitu :

- a. Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang, pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan serta harga-harga yang terjangkau;
- b. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik, dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memilisi kehesi sosial yang kuat serta harmonis;
- c. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri;
- d. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;
- e. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang berjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka telah ditetapkan pula prioritas Pembangunan yang ditujukan pada :

- f. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
- g. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;
- h. Pembangunan infrastruktur yang biak dan berwawasan lingkungan;
- i. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
- j. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

3. RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006-2026, Khususnya pelaksanaan periode keempat dengan Visi **"Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan"**. dimana penekanan kebijakan sebagai berikut:

Visi pembangunan Kabupaten harus tetap mengacu kepada visi pembangunan nasional dan Sumatera Utara. Visi di atas memiliki indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur pencapaian keberhasilan dari visi tersebut. Visi ini memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk dapat merasakan dampak dari adanya pembangunan. Masyarakat yang menjadi sasaran utama pembangunan, mereka yang harus merasakan manfaat dari pelaksanaan pembangunan. Hakekat yang terkandung dalam pernyataan visi tersebut di atas ada 3 (tiga), yaitu : **sejahtera, demokratis dan berkeadilan**.



### 1. Sejahtera

Tingkat kemajuan suatu bangsa akan ditentukan oleh kesejahteraan masyarakatnya. Indikatornya dapat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang makin meningkat, termasuk derajat kesehatan, dan tingkat pendidikan, kemampuan ekonomi yang membaik berupa pendapatan dan daya beli yang tinggi, serta kemudahan untuk mendapatkan pelayanan sosial, baik pendidikan, kesehatan maupun pelayanan administrasi.

### 2. Demokratis

Sifat masyarakat Tapanuli Tengah mengutamakan musyawarah termasuk dalam merumuskan tujuan pembangunan. Moto masyarakat Tapanuli Tengah yang tertera dalam lambang daerah yang berbunyi "**SAHATA SAOLOAN**" menegaskan mengenai pentingnya musyawarah dalam mencapai mufakat. Proses musyawarah dilakukan dalam suasana yang demokratis, memiliki respek terhadap pihak lain, adanya perasaan satu sikap, satu kata yang tidak didasarkan oleh pemaksaan tetapi melalui kesadaran yang dibangun bersama dalam situasi yang demokratis.

### 3. Berkeadilan

Adanya keunikan dan perbedaan dalam suatu masyarakat merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari. Namun demikian perbedaan dan keunikan tersebut tidak menjadi penghalang bagi anggota masyarakat untuk merasakan dan menikmati keberhasilan pembangunan. Kebiasaan untuk bermusyawarah yang dilandasi oleh perasaan respek akan mendukung kepada bentuk perlakuan adil bagi segenap anggota masyarakatnya tanpa memandang perbedaan, baik perbedaan gender, agama dan latar belakang sosial ekonomi.

Dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah untuk 20 tahun mendatang, telah ditentukan misi yang merupakan penopang bagi pencapaian visi tersebut. Kabupaten Tapanuli Tengah telah menetapkan 5 misi pembangunan, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*),

Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terwujud pada kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparat serta mengurangi praktek-praktek KKN pada semua level jajaran dalam birokrasi; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengawasan terhadap birokrasi; serta melakukan pembenahan dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil sehingga dapat mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menciptakan kepastian investasi.



**2. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat.**

Pembangunan yang mengedepankan pembangunan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, melalui peningkatan pendidikan di semua jalur, jenis dan jenjang; meningkatkan kualitas hidup melalui penyediaan akses yang sama terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial tanpa diskriminasi gender, etnis, dan agama dengan dilandasi penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM); meningkatkan kesadaran dan kualitas beragama dan toleransi antar umat beragama, serta kesadaran akan pluralisme.

**3. Memberdayakan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat.**

Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; optimalisasi pemanfaatan sumber daya darat dan atau laut melalui pengembangan pembangunan berbasis kawasan guna mendorong pertumbuhan dan memperkuat perekonomian wilayah serta berorientasi dan berdaya saing pada tingkat internasional; menerapkan sistem pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang efisien, efektif, berlandaskan hukum, berwawasan lingkungan, berkeadilan, transparan, dan demokrasi.

**4. Memberdayakan potensi sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kekuatan sosial yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan.**

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dilakukan dengan memperkuat peran serta semua lapisan masyarakat dalam pembangunan melalui pelibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol tanpa diskriminasi sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* berjalan, menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*); menciptakan wadah terbuka dan demokratis bagi dialog kebudayaan sehingga tercapai kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan, menumbuhkan rasa persatuan, menumbuhkan penghormatan terhadap nilai pluralisme dan HAM; meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

**5. Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan**

Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, pemerataan ekonomi, dan daya saing melalui strategi pengembangan



ekonomi terintegrasi berbasis kawasan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan atau laut dan daya dukung wilayah; mengembangkan dan memperkuat perekonomian yang berbasis pada keunggulan sumber daya daerah dan daya dukung lingkungan; mendorong pengembangan ekonomi mikro melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM); mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh melalui pembangunan perekonomian yang merata dan berkelanjutan; dan meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan, rehabilitasi, bantuan sosial dan kesejahteraan sosial masyarakat; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Berlandaskan pencapaian dari RPJMD ke-3, dan RPJMD ke-4 ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang lebih menekankan penyiapan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pusat industri dan pariwisata dengan tetap mempertahankan pembangunan pertanian dan perikanan dengan berbasis komoditas unggulan dan kawasan untuk memperluas pasar regional dan internasional.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditandai dengan pendapatan perkapita yang makin meningkat, kesehatan yang membaik serta tingkat pendidikan yang makin tinggi. Dengan disertai makin sedikitnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Untuk mencapai kondisi ini dapat diwujudkan melalui peningkatan daya saing perekonomian dengan makin meningkatnya daya kompetitif kualitas barang dan jasa yang dihasilkan dari industri yang ada serta semakin terpadunya industri manufaktur dengan industri pertanian dan perikanan yang menjadi keunggulan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan tata ruang ditandai dengan berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi, baik darat, laut maupun udara. Pembangunan industri dan pariwisata yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memelihara nilai-nilai luhur budaya lokal.

RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 – 2022 mempunyai 5 (lima) Arah Kebijakan sebagai berikut :

#### **Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2022**

Arah pembangunan pada tahap ini menitikberatkan peningkatan investasi serta pengembangan faktor – faktor yang mendukung investasi serta pengembangan *agro industri* dan *agromarine industri* yang berbasis sumber daya alam lokal serta pelayanan pemerintahan yang profesional, melalui kebijakan :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur;
2. Peningkatan pelsysnsn investasi;
3. Penguatan regulasi yang mendukung investasi;
4. Pengembangan agro industri dan agromarine industri yang berbasis sumber daya alam lokal;
5. Peningkatan profesionalisme Aparatur;



#### 1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Tema pembangunan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 adalah **“Pengembangan Perekonomian Daerah Melalui Sektor Pariwisata, Pertanian, Kelautan, Perikanan, UMKM dan Industri dalam rangka Pemulihan Ekonomi dan Sosial”**

Arah kebijakan memberikan pedoman dan mengarahkan rumusan yang terarah untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun selama RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017-2022.

Arah pembangunan pada tahap ini menitikberatkan peningkatan investasi serta pengembangan faktor – faktor yang mendukung investasi serta pengembangan *agro industri* dan *agromarine industri* yang berbasis sumber daya alam lokal serta pelayanan pemerintahan yang profesional, melalui kebijakan :

Sesuai dengan tema RKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022, prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur;
2. Pengembangan Sentra – sentra Ekonomi;
3. Pengembangan Perekonomian Desa/Kelurahan;
4. Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Kerjasama Daerah;

Strategi pembangunan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022. Strategi dalam hal ini adalah merupakan teknis dalam menentukan program dan kegiatan prioritas dan target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun.

Strategi untuk mencapai target Misi Pertama, dikelompokkan, antara lain:

**Misi 1 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.**

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;
2. Meningkatkan sarana prasarana penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Meningkatkan kompetensi dan ketrampilan SDM ASN yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
4. Meningkatkan ketersediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Meningkatkan kesejahteraan pegawai berbasis kinerja;
6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perangkat daerah;
7. Menciptakan sistem pemerintahan berbasis elektronik, transparan dan akuntabel;
8. Memperkuat layanan pengaduan masyarakat;
9. Menyusun regulasi yang diperlukan masyarakat;
10. Menyederhanakan regulasi yang ada.



Strategi untuk mencapai target Misi Kedua dikelompokkan, antara lain:

**Misi 2 : Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif.**

1. Mengembangkan kapasitas, kuantitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang terkoneksi dengan jaringan regional dan Nasional;
2. Mengembangkan kapasitas, kuantitas dan kualitas jaringan irigasi;
3. Menyediakan sistem manajemen transportasi yang berkualitas;
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan;
6. Menyediakan air bersih yang mudah diakses masyarakat;
7. Meningkatkan kuantitas, efektivitas dan efisiensi penggunaan PJU yang terpasang;
8. Menyediakan sarana utilitas secara terpadu untuk mendukung lingkungan yang sehat;
9. Meningkatkan akses layanan air limbah melalui sistem komunal maupun individu;
10. Meningkatkan cakupan pelayan pengelolaan sampah secara ramah lingkungan, berkelanjutan dan memiliki nilai ekonomi;
11. Menciptakan Lingkungan Permukiman yang sehat dan layak huni.

Strategi untuk mencapai target Misi Ketiga dikelompokkan, antara lain:

**Misi 3 : Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.**

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. Tersedianya tenaga kesehatan yang berkualitas dan merata;
3. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
4. Peningkatan status gizi masyarakat;
5. Meningkatkan ketersediaan vitamin dan pelayanan vaksinasi di masyarakat;
6. Menggalakkan kebiasaan makan dan perilaku hidup sehat;
7. Meningkatkan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin melalui Jamkesda dan Jamksesmas;
8. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesejahteraan keluarga;
9. Meningkatkan cakupan peserta KB Aktif;
10. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui optimalisasi pelayanan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, penguatan jaringan, penguatan kelembagaan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Strategi untuk mencapai target Misi Keempat dikelompokkan, antara lain:

- Misi 4 : Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.**
1. Meningkatkan kualitas pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar baik Formal maupun non Formal;
  2. Meningkatkan kualitas akses sarana prasarana dan perluasan layanan pendidikan;
  3. Menyediakan beasiswa bagi siswa/i lulusan SMA/ sederajat yang berprestasi;
  4. Menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi untuk mahasiswa/i Perguruan Tinggi;
  5. Meningkatkan Sumber daya Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  6. Meningkatkan profesionalisme guru dan penyelenggaraan lembaga pendidikan;
  7. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;
  8. Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga.

Strategi untuk mencapai target Misi Kelima dikelompokkan, antara lain:

- Misi 5 : Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menuju kedaulatan sumber daya alam berkarakter.**
1. Mengoptimalkan potensi unggulan daerah;
  2. Meningkatkan kualitas SDM usaha UMKM, IKM dan Koperasi dalam pengaplikasian teknologi tepat guna;
  3. Fasilitasi kepemilikan sertifikat mutu produk;
  4. Meningkatkan akses pemasaran produk usaha UMKM, IKM dan Koperasi;
  5. Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan UMKM, IKM dan Koperasi;
  6. Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas produk-produk unggulan;
  7. Meningkatkan kemitraan UMKM, IKM dan Koperasi;
  8. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dalam upaya mencegah dampak pencemaran lingkungan hidup;
  9. Internalisasi pengurangan resiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Strategi untuk mencapai target Misi Keenam dikelompokkan, antara lain:

- Misi 6 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.**
1. Meningkatkan kerukunan umat beragama;
  2. Meningkatkan apresiasi dan promosi karya seni, karya budaya, dan warisan budaya;
  3. Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman, dan pagelaran seni dan karya budaya;
  4. Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi Aparatur Negara dan masyarakat.





Strategi untuk mencapai target Misi Ketujuh dikelompokkan, antara lain:

**Misi 7 : Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat**

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk industri olahan kreatif
2. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pro rakyat;
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dalam mengurus perizinan investasi;
4. Revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektifitas pelatihan yang diberikan kepada penduduk lokal;
5. Perlindungan ketenagakerjaan melalui tata kelola dan kerjasama hubungan industri.

Strategi untuk mencapai target Misi Kedelapan dikelompokkan, antara lain:

**Misi 8 : Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat**

1. Mengembangkan sarana dan prasarana pariwisata;
2. Mengembangkan destinasi wisata dengan didukung fasilitas investasi dan pembinaan usaha sektor pariwisata bagi masyarakat lokal;
3. Menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi (DMO-*Destination Management Organisation*);
4. Meningkatkan pemasaran pariwisata;
5. Pembentukan pusat-pusat promosi pariwisata di daerah tujuan wisata (DTW).

Strategi untuk mencapai target Misi Kesembilan dikelompokkan, antara lain:

**Misi 9 : Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai**

1. Meningkatkan produktifitas tanaman pangan dan kelautan;
2. Peningkatan kualitas infrastruktur bagi petani dan nelayan;
3. Revitalisasi balai penyuluh pertanian (BPP);
4. Asuransi petani dan nelayan;
5. Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nelayan (NTN).

Strategi untuk mencapai target Misi Kesepuluh dikelompokkan, antara lain:

**Misi 10 : Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah**

1. Peningkatan dan pembangunan rumah tidak layak huni;
2. Pengembangan rumah sewa, termasuk rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di perkotaan;
3. Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan pemukiman;
4. Perbaikan sarana dan prasarana dasar permukiman;
5. Menurunkan angka kemiskinan.



Tengah, adalah :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran;
2. Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Pembangunan dan pengembangan pariwisata;
4. Peningkatan infrastruktur;
5. Pembangunan dan optimalisasi bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan;
6. Pengendalian penduduk;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penerapan e-Government;
8. Penguatan ketahanan pangan;
9. Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
10. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
11. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
12. Pengembangan sumber daya manusia;
13. Peningkatan daya saing daerah jasa, perdagangan, produk Koperasi, UKM dan Industri;
14. Peningkatan penyediaan dan layanan air bersih dan sanitasi;
15. Penanggulangan dan mitigasi bencana alam;
16. Penguatan nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan.

### 1.5. Ruang Lingkup

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah selama Tahun 2022. Capaian kinerja (**performance results**) tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (**performance agreement**) Tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tersebut menjelaskan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 - 2022, RKPD dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022.

Sistematika penyajian laporan kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :



- Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, struktur organisasi serta aspek strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 serta hasil target kinerja yang diperjanjikan;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang;



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menyusun Dokumen LKjIP agar terciptalah Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah berpedoman pada dokumen perencanaan antara lain :

1. RPJPD 2006 – 2026, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2006 – 2026;
2. RPJMD 2017 – 2022, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 5);
3. RKPD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022;
4. Indikator Kinerja Utama 2017 - 2022, pada RPJMD 2017 – 2022, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 5);
5. Target Kinerja Bupati 2017 – 2022, yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 Nomor 5);
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

### 2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting, sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi dan pengendalian secara berkelanjutan.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Sebagai kerangka perencanaan jangka panjang dijabarkan dengan perencanaan jangka menengah melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022. Penjabaran lebih lanjut dalam perencanaan tahunan di tuangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022.

Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu daerah melalui pendayagunaan seluruh sumber daya yang tersedia bagi daerah tersebut. Peningkatan kesejahteraan ini dapat berarti peningkatan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi peningkatan itu bukan hanya sekedar menaikkan atau memperbesar melainkan harus mewujudkan suatu titik capaian. Keberhasilan pembangunan yang bersangkutan diukur dari sejauh mana pembangunan itu mewujudkan tingkat capaian yang ditetapkan. Tingkat capaian itu disebut visi yang akan menunjukkan arah pembangunan. Dalam hal ini visi akan menggambarkan ke manakah daerah yang bersangkutan akan dibawa dalam proses pembangunan. Tanpa visi ini, pembangunan akan tidak terarah dan keberhasilannya tidak akan dapat diukur. Visi akan memandu penyelenggara pembangunan dalam setiap kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Tiga hal yang membutuhkan perhatian dalam merumuskan visi suatu daerah adalah:

1. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
3. Letak geografis.

Dengan mempertimbangkan ketiga hal tersebut, visi Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dirumuskan sebagai berikut:



### 2.1.1. Visi

**“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT TAPANULI TENGAH YANG BERKARAKTER, MANDIRI, BERAKHLAK DAN BERKEADILAN YANG SEJAHTERA**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

- Tapanuli Tengah** : Seluruh wilayah dan unsur masyarakat yang bermukim di Kabupaten Tapanuli Tengah dimana unsur masyarakatnya terdiri dari pemerintah, perusahaan, dan perorangan.
- Berkarakter** : Menunjukkan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah memegang teguh prinsip-prinsip kebersamaan, keharmonisan, kerukunan dan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat dengan mempertahankan adat istiadat dan budaya lokal yang dilandasi semangat *sahata saoloan* atau *seia sekato*.
- Mandiri** : Menunjukkan keadaan masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan segala sesuatu yang dipandanginya tepat demi mencapai tujuan hidup dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Kemandirian masyarakat didukung melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam segala aspek pembangunan, pendayagunaan potensi lokal dan sumber daya yang ada, serta peningkatan berbagai prasarana dan sarana perekonomian yang memungkinkan berkembangnya kemampuan ekonomi daerah dan kerakyatan yang optimal.
- Berakhlak** : Keadaan masyarakat yang memiliki akhlak yang mulia berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sebagai landasaan untuk mewujudkan prinsip-prinsip kebersamaan, keharmonisan, kerukunan dan tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian juga terwujud Aparatur Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berakhlak mulia, amanah dan profesional dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat yang dilandasi iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- Berkeadilan** : Merupakan kondisi dimana semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga tidak ada kesenjangan antar wilayah.



**Sejahtera** : Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, meliputi sandang, pangan dan papan, memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak, mendapatkan pekerjaan yang layak, memiliki pendapatan perkapita sesuai kebutuhan hidup. Selanjutnya masyarakat merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari terhindar dari ancaman dan gangguan ketertiban di lingkungannya masing-masing.

### 2.1.2. Misi

Visi tersebut di atas akan diwujudkan melalui pelaksanaan misi. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif;
2. Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif;
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat;
4. Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
5. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam berkarakter;
6. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari;
7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat;
8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat;
9. Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai;
10. Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Pembangunan dilakukan untuk setiap warga Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga tidak ada wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang tidak terjangkau pembangunan, yang dilakukan melalui pengembangan wilayah yang terencana dengan baik. Setiap unsur atau lapisan masyarakat akan diperlakukan sama dan diberi hak yang sama untuk menikmati pembangunan. Pemilihan lokasi pembangunan akan dilakukan dengan mengutamakan pemerataan dengan tetap memelihara keadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antar warga Kabupaten Tapanuli Tengah.

Misi-misi tersebut berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan kata lain terdapat hubungan yang erat antara misi pada RPJMD dengan pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah. Keselarasan tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**



**Keselarasan Misi Pada RPJMD Tahun 2017-2022  
Dengan Misi Pada RPJPD Kabupaten Tapanuli Tengah**

No.	Misi Pada RPJMD Tahun 2017-2022	Misi Pada RPJPD Tahun 2006-2026
1	2	3
1	Misi Pertama: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )
2	Misi Kedua: Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif	Misi Keempat: Memberdayakan potensi sumber daya manusia di lingkungan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kekuatan sosial yang berwawasan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan
3	Misi Ketiga: Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat	Misi Kedua: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat
4	Misi Keempat: Menyediakan pendidikan gratis 12 tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing	Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )  Misi Kedua: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat
5	Misi Kelima: Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam berkarakter	Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>Good Governance</i> )  Misi Ketiga: Memberdayakan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat
6	Misi Keenam: Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari	
7	Misi Ketujuh: Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat	Misi Ketiga: Memberdayakan potensi sumber daya alam dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat
8	Misi Kedelapan:	Misi Kelima:





	Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat	Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
9	Misi Kesembilan: Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai	Misi Kelima: Mengembangkan kebijakan ekonomi yang berwawasan kerakyatan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan
10	Misi Kesepuluh: Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah	Misi Kedua: Meningkatkan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan dan perbaikan pelayanan kesehatan masyarakat

### 2.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2017-2022 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang diharapkan akan dicapai dalam masa 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi dan didasarkan atas isu-isu kajian strategis. Berdasarkan visi, misi, dan isu-isu strategis, dapatlah diterapkan tujuan dan sasaran yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun. Untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, tujuan dan sasaran yang dikaitkan dengan misi.

**Tabel 2.2**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera</b>			
<b>MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN INOVATIF</b>			
	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan Publik yang indeks IKMnya Baik
		2	Jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-government
2	Meningkatnya peran kelembagaan perangkat daerah	3	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan non Perizinan
		4	Hasil Evaluasi LPPD
		5	Hasil Evaluasi LAKIP
		6	Opini BPK Terhadap Hasil LKPD



3	Tersedianya regulasi tentang pelayanan publik	7	Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan
<b>MISI 2 : TERSEDIAANYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF</b>			
4	Terpelihara dan terbangunnya infrastruktur sosial, ekonomi dan pemerintahan	8	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik
		9	Panjang jembatan dalam kondisi baik
		10	Pengembangan pelabuhan perikanan
		11	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik
		12	Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan
		13	Persentase Pasar tradisional yang tergolong Baik
		14	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan
5	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (Air minum, air bersih, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas kawasan Permukiman)	15	Penanganan Luas Kawasan kumuh
		16	Akses air minum layak
		17	Sanitasi layak
		18	Penanganan Desa yang belum dialiri listrik
		19	Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi
		20	Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui Pemanfaatan TIK
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT</b>			
6	Meningkatnya Kualitas layanan kesehatan masyarakat	21	Jumlah Kematian Ibu
		22	Angka Kematian Bayi
		23	Angka harapan Hidup
7	Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi	24	Prevalensi Balita gizi buruk
8	Meningkatnya Jaminan kesehatan masyarakat	25	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
9	Meningkatnya kualitas layanan keluarga berencana	26	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk
		27	Angka kelahiran total
		28	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi
10	Meningkatnya keberdayaan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	29	Cakupan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
		30	Cakupan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap Anak
<b>MISI 4 : MENYEDIAKAN PENDIDIKAN GRATIS 12 TAHUN DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN YANG MEMILIKI DAYA SAING</b>			
11	Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	31	Rata-rata lama sekolah
		32	Angka Harapan lama sekolah
		33	Persentase SD yang Akreditasi A
		34	Persentase SMP yang Akreditasi A



		35	Persentase SMA/ SMK yang Akreditasi A
12	Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu	36	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi penerima beasiswa
13	Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter / akhlak (revolusi mental)	37	Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter / akhlak (revolusi mental)
14	Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	38	Jumlah pemuda wirausaha
15	Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga	39	Jumlah kompetisi olah raga
<b>MISI 5 : MENUMBUHKEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT MENUJU KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM BERKARAKTER</b>			
16	Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi lokal	40	Jumlah UMKM
		41	Jumlah Koperasi
		42	Persentase Koperasi Aktif
		43	Jumlah tenaga kerja UMKM dan Koperasi
		44	Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk
		45	Pertumbuhan industri
17	Meningkatkan pembinaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM, dan Koperasi	47	Persentase UMKM dan Koperasi yang dibina pemerintah daerah
		48	Persentase IKM yang dibina pemerintah daerah
18	Meningkatkan akses pemasaran hasil UMKM, IKM, dan Koperasi	49	Kegiatan pameran/promosi IKM
19	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	50	Rasio Cakupan pengawasan terhadap Amdal
20	Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	51	Rasio penanggulangan bencana
<b>MISI 6 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BUDAYA YANG LESTARI</b>			
21	Meningkatnya kerukunan umat beragama	52	Persentase berkurangnya permasalahan isu SARA di Kabupaten Tapanuli Tengah
22	Meningkatnya pelestarian budaya, situs dan cagar budaya	53	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
		54	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
		55	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan
23	Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan	56	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan
<b>MISI 7 : MENCIPTAKAN DUNIA USAHA DAN INVESTASI YANG ADIL DAN PRO</b>			



<b>RAKYAT</b>			
24	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industri pengolahan dan kreatif	57	Cakupan bina kelompok pengrajin
25	Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha	58	Jumlah PMA
		59	Jumlah PMDN
		60	Jumlah jenis perijinan yang dilayani
		61	Jumlah jenis non perijinan yang dilayani
26	Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal	62	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
		63	Tingkat pengangguran terbuka
		64	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah
27	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial yang harmonis	65	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
		66	Tingkat Kepatuhan wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan
		67	Tingkat peraturan perusahaan yang di sahkan
		68	Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan
		69	Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek
		70	Jumlah Pekerja Buruh yang menjadi anggota Jamsostek
		71	Tingkat perselisihan Hubungan industrial
		72	Tingkat Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah
		73	Tingkat LKS biparted di perusahaan
<b>MISI 8 : MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA SECARA SERIUS MENUJU PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT</b>			
28	Meningkatnya destinasi wisata	74	Jumlah destinasi wisata yang dibangun
29	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan mancanegara (wisman)	75	Jumlah Wisatawan Mancanegara
		76	Jumlah Wisatawan Nusantara
<b>MISI 9: TERSEDIAANYA KEBUTUHAN PETANI DAN NELAYAN YANG CUKUP DAN MEMADAI</b>			
30	Meningkatnya Hasil Produksi dari sektor pertanian dan sektor kelautan	77	Tanaman Pangan :
			- Padi
		78	- Jagung
		79	Perkebunan :
			- Kelapa Sawit
		80	- Karet
31	Meningkatnya sarana dan	81	Perikanan :
			- Perikanan Tangkap
		82	- Perikanan Budidaya
31	Meningkatnya sarana dan	83	Persentase Jaringan irigasi tersier



	prasarana sektor pertanian dan kelautan		kondisi baik
		84	Persentase Jalan Desa Nelayan kondisi baik
		85	persentase alsintan dalam kondisi baik
		86	Persentase peningkatan alat tangkap nelayan
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh dan lembaga penyuluhan	87	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat
		88	Jumlah BPP
33	Terpenuhinya jaminan sosial bagi petani dan nelayan	89	Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial
<b>MISI 10 : TERWUJUDNYA RUMAH SEHAT BAGI WARGA MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH</b>			
34	Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta terwujudnya penyediaan perumahan dan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	90	Menurunnya Jumlah rumah tidak layak huni
		91	Jumlah rusunawa
		92	Jumlah perumahan nelayan
35	Meningkatnya Penyehatan lingkungan permukiman kumuh	93	Menurunnya Jumlah luasan kawasan kumuh
		94	Jumlah Rumah Tangga Bersantiasi
		95	Meningkatnya pelayanan air minum
		96	Meningkatnya Jumlah MCK Umum
36	Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin	97	Angka kemiskinan
		98	Jumlah Masyarakat Miskin penerima santunan

#### 2.1.4. SLOGAN PEMBANGUNAN

**“TAPTENG MERAKYAT”  
( MEMBANGUN UNTUK RAKYAT )**

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Tapanuli Tengah dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017 – 2022 yang telah menjadi Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Tengah dan dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 – 2022 bahwa pembangunan 5 (lima) Tahun kedepan difokuskan pada pembangunan infrastruktur publik yang memadai yang belum selesai dilaksanakan Tahun 2016. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur diarahkan pada infrastruktur yang mendukung perekonomian dan investasi antara lain jalan, jembatan, air minum dan air bersih, irigasi, sanitasi dan pemukiman dengan pembiayaan yang bersumber dari Dana APBN, APBD Provinsi Sumatera Utara dan APBD Kabupaten Tapanuli Tengah terutama dari Dana Desa.



Dengan pembangunan infrastruktur diharapkan akan meningkatkan konektivitas seluruh wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan terus dikembangkan hingga terwujud jalan dan jembatan dalam kondisi baik, Jalur transportasi yang menghubungkan desa, kecamatan sampai ke kota dapat berjalan lancar. Demikian juga kondisi saluran irigasi dan daerah irigasi semakin baik serta peningkatan pembangunan dan peningkatan kualitas sanitasi dan permukiman agar terwujud permukiman masyarakat yang sehat dan nyaman. Selanjutnya tahapan pembangunan Bandara DR.F.L.Tobing akan diarahkan kepada pengembangan bandara dan perpanjangan runway sesuai *Master Plan Pengembangan Bandara DR.F.L.Tobing* untuk mendukung bahwa Tapanuli Tengah merupakan pintu gerbang transportasi udara dan destinasi wisata di Kawasan Barat Sumatera Utara.

Pembangunan di Bidang Pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan, yang bersih dan berwibawa akan diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ASN, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan dan layanan pemerintah yang berbasis e-government (e-planning, e-budgetting, e-perijinan dan layanan berbasis elektronik lainnya) serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP).

Di Bidang Pendidikan akan diwujudkan pelayanan pendidikan gratis 12 tahun meliputi peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemberian beasiswa bagi yang siswa/siswi yang kurang mampu serta mewujudkan pendidikan karakter/akhlaq bagi seluruh tingkatan pendidikan dan pendidikan karakter (revolusi mental) bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

Di Bidang Kesehatan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar dan rujukan disertai dengan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan sarana dan prasarana serta peralatan kesehatan yang memadai.

Pengembangan perekonomian rakyat melalui pemanfaatan sumber daya alam yaitu pariwisata, pertanian serta kelautan dan perikanan. Pembangunan di bidang Pariwisata akan diwujudkan melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada dan pembangunan destinasi wisata baru (Titik Nol Peradaban Islam Nusantara, Makam Mahligai, Makam Papan Tinggi, Sumur Nomensen serta Objek Wisata Pantai di Kabupaten Tapanuli Tengah) sesuai dengan *Master Plan, Detailed Engineering Design (DED) Survey Investigasi Design (SID)* yang disusun. Di Bidang Pertanian diarahkan kepada peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Dengan pemanfaatan teknologi pertanian juga akan dikembangkan pertanian organik untuk mewujudkan kemandirian pangan dan keanekaragaman pangan. Di Bidang Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan dan kesejahteraan nelayan. Dengan demikian melalui pembangunan perekonomian rakyat akan tumbuh sentra-sentra industri dan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan demikian seluruh program dan kegiatan pembangunan diperuntukkan untuk seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah.



**Tabel 2.3**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Target**  
**RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD PELAKSANA	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>MISI 1 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA DAN INOVATIF</b>														
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	
1.	1.1.	1.1.1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	1. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan Publik yang indeks IKMnya Baik	%	0	0	10	20	30	40	50	50	16 SKPD
				2. Jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-government	Jumlah	0	0	4	12	12	12	12	12	7 SKPD
		1.1.2	Meningkatnya peran kelembagaan perangkat daerah	1. Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Hari	22	12	2	2	1	8 Jam	4 Jam	4 Jam	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
				2. Hasil Evaluasi	Nilai	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sangat	Sangat	BAPPEDA



		LPPD									Tinggi	Tinggi	
		3. Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	D	C	C	CC	BB	BB	BB	BB	BB	Bagian Pembangunan Setdakab
		4. Opini BPK Terhadap Hasil LKPD	Indeks	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan PKAD
	1.1.3 Tersedianya regulasi tentang pelayanan publik	Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan	Jumlah Perda	0	0	0	1	0	0	0	0	1	Bagian Hukum





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana		
						2017	2018	2019	2020	2021	2022				
<b>MISI 2 : TERSEDIAYA INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG MEMADAI DAN EFEKTIF</b>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2	2.1.	2.1.1	Terpelihara dan terbangunnya infrastruktur sosial, ekonomi dan pemerintahan	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	50,19	55,19	60,19	65,19	70,19	75,19	80,19	80,19	Dinas PU dan PR	
				2. Panjang jembatan dalam kondisi baik	M	1395,95	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64	165,84	Dinas PU dan PR	
				3. Pengembangan pelabuhan perikanan	Unit	5	1	1	0	1	1	0	9	Dinas PU dan PR	
				4. Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	80,77	83	85	87	89	91	93	93	Dinas PU dan PR	
				5. Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan	Gedung OPD (unit)	28	0	2	2	2	2	3	17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
					Kantor Lurah (unit)	54	9	9	9	9	9	9	9	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					Kantor Desa (unit)	154	26	26	26	26	26	25	25	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
				7. Persentase Pasar tradisional yang tergolong Baik	%	30	34	51,8	63	77,8	88,8	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi & UKM	



			7. Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan	%	30	33,7	42	50	58	66	75	75	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	2.1.2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (Air minum, air bersih, Sanitasi, dan Prasarana, Sarana dan utilitas kawasan Permukiman)	1. Penanganan Luas Kawasan kumuh	Ha	91,29	10	14	14	14	14	14	14	11,29	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
		2. Akses air minum layak	Persentase Sambungan Rumah	50	57,48	65,20	73,19	81,29	90,10	99,07	99,07		Dinas Perkim, PDAM Muall Nauli, PDAM Tirtanadi	
		3. Sanitasi layak	Persentase Rumah tangga	18	18	19	19,75	20,50	21,25	22	22		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Kesehatan	
		4. Penanganan Desa yang belum dialiri listrik	Desa	79	0	40	39	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		5. Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi	Blank Spot (Desa)	29	29	27	25	23	21	19	19		Dinas Kominfo	
		6. Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui Pemanfaatan TIK	Menara	0	0	3	3	3	3	3	3	3		Dinas Kominfo



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>MISI 3 : MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERMUTU BAGI MASYARAKAT</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3.1 Meningkatkan Derajat kesehatan Masyarakat	3.1.1 Meningkatkan Kualitas layanan kesehatan masyarakat	1. Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	11	11	8	5	4	2	0	0	Dinas Kesehatan, RSUD Pandan
			2. Angka Kematian Bayi	jiwa	6	5	5	5	4	4	4	4	Dinas Kesehatan, RSUD Pandan
			3. Angka harapan Hidup	%	66,62	66,62	66,72	66,82	66,92	67,02	67,12	67,12	
		3.1.2 Menurunkan Prevalensi kekurangan Gizi	1. Prevalensi Balita gizi buruk	%	5	5	4	3	2	1	0	0	Dinas Kesehatan, RSUD Pandan, Dinas Ketahanan Pangan
		3.1.3 Meningkatkan Jaminan kesehatan masyarakat	1. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	60	60	65	70	80	90	100	100	Dinas Kesehatan, RSUD Pandan, Dinas Sosial
		3.1.4 Meningkatkan kualitas layanan keluarga	1. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	%	1,84	1,84	1,82	1,80	1,78	1,76	1,75	1,75	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB



		berencana											
			2. Angka kelahiran total	Jiwa	2,1	2,1	2,0	1,97	1,92	1,89	1,87	1,87	
			3. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	69,74	69,74	69,80	70,01	70,15	70,20	70,25	70,25	
3.2 Meningkatkan Kualitas anak dan Perempuan	3.2.1 Meningkatnya keberdayaan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak	1. Cakupan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%	42,4	50	60	70	80	90	100	100	100	Dinas PP dan PA, KPAID
		2. Cakupan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap Anak	%	20	50	60	70	80	90	100	100		



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>MISI 4 : MENYEDIAKAN PENDIDIKAN GRATIS 12 TAHUN DAN MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN YANG MEMILIKI DAYA SAING</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4.1. Meningkatkan Mutu pendidikan masyarakat	4.1.1. Meningkatkan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,03	8,13	8,23	8,33	8,43	8,53	8,83	8,63	Dinas Pendidikan
			2. Angka Harapan lama sekolah	Tahun	12,45	12,60	12,74	12,89	13,03	13,18	13,32	13,32	
			3. Persentase SD yang Akreditasi A	%	0,65	0,68	0,69	0,70	0,71	0,72	0,73	0,73	
			4. Persentase SMP yang Akreditasi A	%	12,82	12,83	12,84	12,85	12,86	12,87	12,88	12,88	
			5. Persentase SMA/SMK yang Akreditasi A	%	26,09	26,10	26,11	26,12	26,13	26,14	26,15	26,15	
	4.1.2	Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu.	1. Jumlah mahasiswa kurang mampu yang prestasi penerima beasiswa	Orang	0	0	5	10	10	15	20	20	Dinas Pendidikan, BKD
	4.1.3	Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter / akhlak (revolusi mental)	1. Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter / akhlak (revolusi mental)	Modul	0	0	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan, Badan PSDM, Dinas Perpustakaan



4.2	Meningkatkan Peran Serta Kepemudaan dan Prestasi Olah Raga	4.2.1 Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan	1. Jumlah pemuda wirausaha	Orang	3	3	30	30	40	50	60	60	Dinas Pora
		4.2.2 Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olah raga	2. Jumlah kompetisi olah raga	Event	16	15	18	20	22	24	26	26	Dinas Pora



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>MISI 5 : MENUMBUHKEMBANGKAN PEREKONOMIAN RAKYAT MENUJU KEDAULATAN SUMBER DAYA ALAM BERKARAKTER</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
5	5.1	5.1.1	Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi lokal	1. Jumlah UMKM	Unit	25.035	25.135	25.235	25.335	25.435	25.535	25.650	25.650	Dinas Koperasi dan UKM
				2. Jumlah Koperasi	Unit	359	359	362	365	368	371	375	375	Dinas Koperasi dan UKM
				3. Persentase Koperasi Aktif	%	41,78	43	44	45	46	47	50	50	Dinas Koperasi dan UKM
				4. Jumlah tenaga kerja UMKM dan Koperasi	Orang	50.070	52.270	52.470	52.670	52.870	53.070	53.300	53.300	Dinas Koperasi dan UKM
					Orang	1.227	1.227	1.236	1.245	1.254	1.263	1.272	1.272	Dinas Koperasi dan UKM
				5. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Unit	25.030	25.130	25.230	25.330	25.430	25.530	25.645	25.645	Dinas Koperasi dan UKM
				6. Pertumbuhan industri	%	2,81	3	3,2	3,3	3,5	3,8	4	4	Dinas Perindag
				7. Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Unit	1	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perindag
		5.1.2	Meningkatkan pembinaan oleh pemerintah	1. Persentase UMKM dan Koperasi yang dibangun pemerintah daerah	Unit	0	0	3	3	3	3	3	3	Dinas Koperasi dan UKM



		daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi	2. Persentase IKM yang dibina pemerintah daerah	Unit	1.932	1.997	2.067	2.142	2.222	2.307	2.398	2.398	Dinas Perindag
	5.1.3	Meningkatkan akses pemasaran hasil UMKM, IKM dan Koperasi	1. Kegiatan pameran/promosi IKM	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Dinas Perindag
5.2	Meningkatkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup	5.2.1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Rasio Cakupan pengawasan terhadap Amdel	%	44,44	50	52	54	56	58	60	60	Dinas Lingkungan Hidup
		5.2.2 Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana	2. Rasio penanggulangan bencana	%	29,49	33,49	37,49	41,49	45,49	49,49	52,90	52,90	BPBD





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>MISI 6 : MEMPERKOKOH KERUKUNAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BUDAYA YANG LESTARI</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6.1	6.1.1	1. Meningkatkan kerukunan umat beragama	%	100	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
		6.1.2	1. Meningkatkan pelestarian budaya, situs dan cagar budaya	Kegiatan	3	4	6	6	6	6	6	6	Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata
			2. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	1	0	1	0	1	1	1	
			3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit	0	0	1	0	1	0	1	1	
		6.1.3	1. Meningkatkan nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	Bakesbangpol, Satpol PP



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>MISI 7 : MENCIPTAKAN DUNIA USAHA DAN INVESTASI YANG ADIL DAN PRO RAKYAT</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	7.1	Menciptakan iklim usaha dan investasi yang pro rakyat	7.1.1 Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industri pengolahan dan kreatif	1. Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	13	14	15	16	17	18	19	19	Dinas Perindag
			7.1.2 Meningkatkan jumlah investasi dan dunia usaha	1. Jumlah PMA	Perusahaan	4	4	4	4	5	5	5	5	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, Dinas Tenaga Kerja
				2. Jumlah PMDN	Perusahaan	9	10	12	13	14	15	16	16	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
				3. Jumlah jenis perijinan yang dilayani	Jenis	9	99	99	99	99	100	101	101	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
				4. Jumlah jenis non perijinan yang dilayani	Jenis	2	22	22	22	22	23	24	24	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
			7.1.3 Meningkatkan peluang kerja bagi penduduk lokal	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	94,37	94,51	94,60	94,68	94,77	94,84	94,91	94,91	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Tenaga Kerja
				2. Tingkat pengangguran terbuka	%	5,63	5,49	5,40	5,32	5,23	5,16	5,09	5,09	Dinas Tenaga Kerja
				3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Rp/Tenaga Kerja	8.800.000	9.500.000	10.200.000	10.960.000	11.700.000	12.620.000	13.560.000	13.560.000	Dinas Tenaga Kerja



7.1.4	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial yang harmonis	1. Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%	9	8,75	9,24	7,78	7,37	7	6,36	6,36	Dinas Tenaga Kerja
		2. Tingkat Kepatuhan wajib Laporan Ketenagakerjaan di perusahaan	%	62,34	62,5	70,6	77,8	84,2	90	90,99	90,99	
		3. Tingkat peraturan perusahaan yang di sahkan	%	60	65	66,7	68	70	71	73	73	
		4. Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan	%	10,39	10	14,12	17,78	21	24	25	25	
		5. Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
		6. Jumlah Pekerja Buruh yang menjadi anggota Jamsostek	Orang	4155	4200	4250	4300	4350	4400	4450	4450	
		7. Tingkat perselisihan Hubungan industrial	%	1,30	5	1,18	1,11	1,05	1	0,9	0,9	
		8. Tingkat Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap	Jumlah Demonstrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	



			kebijakan pemerintah										
			9. Tingkat LKS biparted di perusahaan	%	1,30	3,75	7,06	11,11	14,74	18	20	20	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>MISI 8 : MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA SECARA SERIUS MENUJU PENINGKATAN EKONOMI RAKYAT</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
8	8.1	Meningkatkan investasi pariwisata	8.1.1 Meningkatkan destinasi wisata	1. Jumlah destinasi wisata yang dibangun	Unit	3	0	3	2	2	2	1	10	Dinas Pariwisata
			8.1.2 Meningkatkan jumlah wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan mancanegara (wisman)	1. Jumlah wisatawan Mancanegara 2. Jumlah wisatawan nusantara	Jiwa Jiwa	145 191.273	160 210.500	174 229.528	189 248.655	203 267.782	218 286.910	232 306.037	232 306.037	Dinas Pariwisata

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana	
						2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>MISI 9 : TERSEDINYA KEBUTUHAN PETANI DAN NELAYAN YANG CUKUP DAN MEMADAI</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
9	9.1	Meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan	9.1.1 Meningkatkan Hasil Produksi dari sektor pertanian dan sektor kelautan	1. Tanaman pangan : - Padi - Jagung 2. Perkebunan : - Kelapa sawit - Karet	Ton/Ha/{GKG} Ton/Ha Ton/Ha Ton/Ha	4,41 4,26 8,95 0,64	4,47 4,36 9,20 0,65	4,54 4,47 9,45 0,66	4,60 4,58 9,70 0,67	4,66 4,69 9,95 0,68	4,72 4,80 10,20 0,69	4,78 4,91 10,45 0,70	4,78 4,91 10,45 0,70	Dinas Pertanian, Dinas Kctapang



		3. Perikanan :												
		- Perikanan Tangkap	Ton	47.912	48.459	49.005	49.552	50.098	50.645	51.195	51.192		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		- Perikanan Budidaya	Ton	149,64	258,39	284,229	312,651	343,917	378,309	416,139	416,139		Dinas Kelautan dan Perikanan	
	9.1.2	Meningkatnya sarana dan prasarana sector pertanian dan keluatan											Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan	
		1. Persentase Jaringan irigasi tersier kondisi baik	%	60	65	70	75	80	85	90	90		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2. Persentase Jalan Desa Nelayan kondisi baik	%	30	30	40	50	60	70	80	80		Dinas Pertanian	
		3. Persentase alsintan dalam kondisi baik	%	40	45	50	55	60	65	70	70		Dinas Kelautan dan Perikanan	
		4. Persentase peningkatan alat tangkap nelayan	%	30	30	40	50	60	70	80	80		Dinas Ketahanan Pangan	
	9.1.3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh dan lembaga penyuluhan											Dinas Ketahanan Pangan	
		1. Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	%	0	0	25	40	60	80	100	100		Dinas Ketahanan Pangan	
		2. Jumlah BPP	Kantor	8	8	10	12	14	16	20	20		Dinas Ketahanan Pangan	
	9.1.4	Terpenuhiya jaminan social bagi petani dan nelayan											Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan	
		1. Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial	%	10	10	20	30	40	50	60	60		Dinas Ketahanan Pangan	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET						KONDISI AKHIR	SKPD Pelaksana
						2017	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>MISI 10 : TERWUJUDNYA RUMAH SEHAT BAGI WARGA MISKIN DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TAPANULI TENGAH</b>													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10.1	10.1.1	1. Menurunnya Jumlah rumah tidak layak huni	Unit	19.781	19.706	19.606	19.506	19.405	19.306	19.206	19.206	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			2. Jumlah rusunawa	Unit	4	0	1	1	1	1	1	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			3. Jumlah perumahan nelayan	Unit	70	122	172	222	272	322	372	372	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		10.1.2	1. Menurunnya jumlah luasan kawasan kumuh	Ha	91,29	81,29	67,29	53,29	39,29	25,29	11,29	11,29	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman



	lingkungan permukiman kumuh	2. Jumlah Rumah Tangga Bersantiasi	%	18	18	19	19,75	20,50	21,25	22	22	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		3. Meningkatnya pelayanan air minum	%	50	57,48	65,20	73,19	81,29	90,10	99,07	99,07	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		4. Meningkatnya Jumlah MCK Umum	Unit	18	18	33	43	53	63	73	73	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	10.1.3 Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin	1. Angka kemiskinan	Orang	24.206	24.206	23.721	23.246	22.781	22.325	21.878	21.878	Dinas Sosial
		2. Jumlah Masyarakat Miskin penerima santunan	Orang	4.248	4.248	4.248	4.240	4.235	4.230	4.225	4.225	Dinas Sosial



## 2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama/ IKU (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi. Dengan ditetapkannya IKU diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

**Tabel 2.4**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Tapanuli Tengah 2017-2022**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN
(1)	(2)	(3)
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik yang indeks IKMnya Baik	%
2	Jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-government	Jumlah
3	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	Hari
4	Hasil Evaluasi LPPD	Nilai
5	Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai
6	Opini BPK terhadap Hasil LKPD	Indeks
7	Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan	Jumlah Perda
8	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%
9	Panjang jembatan dalam kondisi baik	M
10	Pengembangan pelabuhan perikanan	Unit
11	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%
12	Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan	Gedung OPD (unit)
		Kantor Lurah (unit)





		Kantor Desa (unit)
13	Persentase pasar tradisional yang tergolong baik	%
14	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan	%
15	Penanganan Luas Kawasan kumuh	Ha
16	Akses air minum layak	Persentase Sambungan Rumah (SR)
17	Sanitasi layak	Persentase Rumah tangga
18	Penanganan Desa yang belum dialiri listrik	Desa
19	Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi	Blank Spot (Desa)
20	Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui Pemanfaatan TIK	Menara
21	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa
22	Angka Kematian Bayi	Jiwa
23	Angka harapan hidup	Jiwa
24	Prevalensi Balita gizi buruk	%
25	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%
26	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk	%
27	Angka kelahiran total	Jiwa
28	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	%
29	Cakupan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%
30	Cakupan Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%
31	Rata-rata lama sekolah	Tahun
32	Angka harapan lama sekolah	Tahun
33	Persentase SD yang Akreditasi A	%
34	Persentase SMP yang Akreditasi A	%
35	Persentase SMA/ SMK yang Akreditasi A	%
36	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi penerima beasiswa	Orang



37	Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter/ akhlak (revolusi mental)	Modul
38	Jumlah pemuda wirausaha	Orang
39	Jumlah kompetisi olah raga	Event
40	Jumlah UMKM	Unit
41	Jumlah Koperasi	Unit
42	Persentase Koperasi aktif	%
43	Jumlah tenaga kerja UMKM dan Koperasi	Orang
44	Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Unit
45	Pertumbuhan industry	%
46	Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Unit
47	Persentase UMKM dan Koperasi yang dibina pemerintah daerah	Unit
48	Persentase IKM yang dibina pemerintah daerah	Unit
49	Kegiatan pameran/ promosi IKM	Kegiatan
50	Rasio cakupan pengawasan terhadap Amdal	%
51	Rasio penanggulangan bencana	%
52	Persentase berkurangnya permasalahan isu SARA di Kabupaten Tapanuli Tengah	%
53	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan
54	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit
55	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Unit
56	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan	Kegiatan
57	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok
58	Jumlah PMA	Perusahaan
59	Jumlah PMDN	Perusahaan
60	Jumlah jenis perijinan yang dilayani	Jenis
61	Jumlah jenis non perijinan yang dilayani	Jenis
62	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%
63	Tingkat pengangguran terbuka	%



64	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Daerah	Rp/Tenaga Kerja
65	Tingkat Keselamatan dan Perlindungan Tenaga Kerja	%
66	Tingkat Kepatuhan wajib Laport Ketenagakerjaan di perusahaan	%
67	Tingkat peraturan perusahaan yang di sahkan	%
68	Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan	%
69	Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek	%
70	Jumlah Pekerja Buruh yang menjadi anggota Jamsostek	Orang
71	Tingkat perselisihan Hubungan industrial	%
72	Tingkat Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap Kebijakan pemerintah	Jumlah Demonstrasi
73	Tingkat LKS biparted di perusahaan	%
74	Jumlah destinasi wisata yang dibangun	Unit
75	Jumlah wisatawan	Jiwa
76	Jumlah wisatawan nusantara	Jiwa
77	Tanaman pangan :	Ton/ Ha/(GKG)
	- Padi	
	- Jagung	Ton/Ha
78	Perkebunan :	Ton/Ha
	- Kelapa sawit	
	- Karet	Ton/Ha
79	Perikanan :	Ton
	- Perikanan Tangkap	
	- Perikanan Budidaya	Ton
80	Persentase Jaringan irigasi tersier kondisi baik	%
81	Persentase Jalan Desa Nelayan kondisi baik	%
82	Persentase alsintan dalam kondisi baik	%
83	Persentase peningkatan alat tangkap nelayan	%
84	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	%
85	Jumlah BPP	Kantor
86	Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial	%
87	Menurunnya Jumlah rumah tidak layak huni	Unit
88	Jumlah rusunawa	Unit
89	Jumlah perumahan nelayan	Unit
90	Menurunnya jumlah luasan kawasan kumuh	Ha



91	Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi	%
92	Meningkatnya pelayanan air minum	%
93	Meningkatnya Jumlah MCK Umum	Unit
94	Angka kemiskinan	Orang
95	Jumlah Masyarakat Miskin penerima santunan	Orang

### 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 . Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja ini adalah indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah ditetapkan dan **telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.**

Perjanjian Kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022, adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Pertama :</b>			
<b>Menciptakan pemerintah yang bersih, berwibawa dan inovatif.</b>			
1.	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KINERJA PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK YANG DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA APARATUR DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik yang indeks IKM nya baik.	50%
		Jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-government.	12
2.	MENINGKATNYA PERAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan dan Non perijinan.	4 Jam
		Hasil Evaluasi LPPD.	Sangat Tinggi
		Hasil Evaluasi Lakip.	BB
		Opini BPK terhadap hasil LKPD.	WTP
3.	TERSEDIANYA REGULASI YANG DIPERLUKAN MASYARAKAT.	Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan.	0 (Jumlah Perda )

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Kedua :</b>			
<b>Tersedianya Infrastruktur publik yang memadai dan efektif.</b>			
4.	TERPELIHARA DAN TERBANGUNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN.	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	80,19%
		Panjang jembatan dalam kondisi baik.	27,64 M
		Pengembangan Pelabuhan perikanan.	0 Unit
		Persentase luas irigasi	93%



		dalam kondisi baik.	
		Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan.	3Unit Gedung OPD 9 Unit kantor lurah 25 Unit kantor desa
		Persentase pasar tradisional yang tergolong baik.	100 %
		Persentase pasar yang memenuhi persyaratan.	75 %
5.	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (AIR MINUM, AIR BERSIH, SANITASI, SARANA PRASARANA DAN UTILITAS KAWASAN PEMUKIMAN)	Penanganan luas kawasan kumuh	14 Ha
		Akses air minum layak	99,07%
		Sanitasi layak	22%
		Penanganan desa yang belum dialiri listrik	0 Desa
		Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi.	19 Blank Spot
		Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui pemanfaatan TIK.	3 Menara

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Ketiga :</b>			
<b>Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.</b>			
6.	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.	Jumlah kematian Ibu melahirkan.	0 Jiwa
		Jumlah kematian Bayi.	4 Jiwa
		Angka Harapan Hidup.	67,12%
7.	Menurunnya Prevalensi kekurangan Giji.	Prevalensi Balita Giji buruk.	0%
8.	Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat.	Persentase penduduk yang menjadi peserta	100%



		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	
9.	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KELUARGA BERENCANA.	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk.	1,75%
		Angka Kelahiran Total	1,87 Orang
		Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.	70,25
10.	MENINGKATNYA KEBERDAYAAN, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.	Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.	100%
		Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.	100%

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Keempat :</b>			
<b>Menyediakan pendidikan gratis 12 Tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing</b>			
11.	MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSEBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL.	Rata-rata lama sekolah.	8,63 Tahun
		Angka harapan lama sekolah.	13,32 Tahun
		Persentase SD yang Akreditasi A.	0,73%
		Persentase SMP yang Akreditasi A.	12,88%
		Persentase SMA/SMK yang Akreditasi A.	26,15%
12.	TERSEDIANYA BEASISWA BERPRESTASI BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU.	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi penerima Beasiswa.	20 Orang
13.	TERWUJUDNYA PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KARAKTER/AKHLAK (REVOLUSI MENTAL)	Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter/akhlak (Revolusi Mental)	1 Modul
14.	MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA DIBERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN.	Jumlah pemuda wirausaha.	60 Orang
15.	PENINGKATAN UPAYA PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI OLAH RAGA.	Jumlah Kompetisi Olah Raga.	26 Event



NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Kelima :</b>			
<b>Menumbuh kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA) berkarakter</b>			
16.	MENINGKATKAN DAYA SAING PELAKU EKONOMI KELOMPOK UMKM DAN KOPERASI YANG BERBASIS POTENSI LOKAL.	Jumlah UMKM	25.650 Unit
		Jumlah Koperasi	375 Unit
		Persentase Koperasi Aktif.	50 %
		Jumlah tenaga kerja UMKM dan Koperasi.	53.300 Orang
			1.272
		Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk.	25.645 Unit
		Pertumbuhan Industri	4%
		Jumlah IKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk.	2 Unit
17.	MENINGKATKAN PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM, IKM DAN KOPERASI.	Persentase UMKM dan koperasi yang dibina Pemerintah Daerah.	3 %
		Jumlah IKM yang dibina Pemerintah Daerah.	2.398 Unit
18.	MENINGKATKAN AKSES PEMASARAN HASIL INDUSTRI UMKM, IKM DAN KOPERASI.	Jumlah kegiatan Pameran/promosi IKM.	2 Kegiatan
19.	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.	Rasio cakupan pengawasan terhadap Amdal.	60%
20.	PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA ALAM.	Rasio penanggulangan Bencana.	52,90%





NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Keenam :</b>			
<b>Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari</b>			
21.	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA.	Persentase berkurangnya permasalahan isu SARA di Kabupaten Tapanuli Tengah.	100%
22.	MENINGKATNYA PELESTARIAN BUDAYA, SITUS DAN CAGAR BUDAYA.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya.	6 Kegiatan
		Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya.	1 Unit
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.	1 Unit.
23.	MENINGKATNYA NILAI-NILAI PERSATUAN DAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN.	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.	2 Kegiatan.

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Ketujuh :</b>			
<b>Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat.</b>			
24.	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN DAN KREATIF.	Cakupan bina kelompok pengrajin.	19 Kelompok
25.	MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI DAN DUNIA USAHA.	Jumlah PMA	5 Perusahaan
		Jumlah PMDN	16 Perusahaan
		Jumlah jenis perijinan yang dilayani.	101 Jenis
		Jumlah jenis Non perijinan yang dilayani.	24 Jenis
26.	MENINGKATNYA	Tingkat partisipasi	94,91%



PELUANG KERJA BAGI PENDUDUK LOKAL.	angkatan kerja.	
	Tingkat pengangguran terbuka.	5,09%
	Tingkat produktifitas tenaga kerja Daerah.	Rp. 13.560 .000,-/ Tenaga Kerja.
27. MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS.	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.	6,38 %
	Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenaga kerjaan diperusahaan	90,99%
	Tingkat peraturan perusahaan yang disahkan	73%
	Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan	25%
	Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek.	100%
	Jumlah pekerja buruh yang menjadi anggota Jamsostek.	4.450 Orang
	Tingkat perselisihan hubungan industrial.	0.90%
	Tingkat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah.	0 Jumlah Demonstrasi.
Tingkat LKS biparted diperusahaan.	20%	

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Kedelapan :</b>			
<b>Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.</b>			
28.	MENINGKATNYA DESTINASI WISATA.	Jumlah Destinasi wisata yang dibangun.	1
29.	MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN NUSANTARA (WISNU) DAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN)	Jumlah Wisatawan Mancanegara.	232
		Jumlah Wisatawan Nusantara.	306.037 jiwa



NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Kesembilan :</b>			
<b>Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai.</b>			
30.	MENINGKATNYA HASIL PRODUKSI DARI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR KELAUTAN.	Jumlah tanaman pangan Padi.	4,78Ton
		Jumlah tanaman pangan Jagung.	4,91 Ton
		Luas perkebunan Kelapa Sawit.	10,40 Ha
		Luas perkebunan Karet.	0,70 Ha
		Hasil perikanan tangkap.	51.192 Ton
		Hasil perikanan Budaya.	416.119 Ton
31.	MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA SEKTOR PERTANIAN DAN KELAUTAN.	Persentase jaringan irigasi yang kondisi baik.	90%
		Persentase jalan desa nelayan kondisi baik.	80%
		Persentase Alsintan dalam kondisi baik.	70%
		Persentase peningkatan alat tangkap nelayan.	80%
32.	MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PENYULUH DAN LEMBAGA PENYULUHAN.	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat.	100%
		Jumlah BPP.	20 Kantor
33.	TERPENUHINYA JAMINAN SOSIAL BAGI PETANI DAN NELAYAN.	Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial.	60%



NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Misi Kesepuluh :</b> <b>Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.</b>			
34.	BERKURANGNYA JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) SERTA TERWUJUDNYA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN HUNIAN VERTIKAL (RUSUNAWA DAN RUSUNAMI) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR).	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni.	19.206 Unit
		Jumlah Rusunawa	1 Unit
		Jumlah perumahan nelayan.	372 Unit
35.	MENINGKATNYA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH.	Menurunnya jumlah luasan kawasan kumuh.	11,29 Ha
		Jumlah rumah tangga yang bersanitasi.	22%
		Meningkatnya pelayanan air minum.	99,7%
		Meningkatnya jumlah MCK Umum	73 Unit
36.	TERSEDIANYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.	Angka kemiskinan	21.878 Orang
		Jumlah Masyarakat Miskin penerima santunan	4.225 Orang



NO	PROGRAM	ANGGARAN Rp.
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	240.877.737.150,00
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	92.378.757.711,00
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.030.000.000,00
5	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	112.966.970.187,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	79.187.355.623,00
7	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	8.509.195.080,00
8	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	125.847.896,00
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	264.018.948,00
10	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	6.791.658.412,00
11	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	12.998.220.210,00
12	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	9.461.101.00,00
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.459.999.881,00
14	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	500.000.000,00
15	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.964.999.694
16	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	30.534.622.056,00
17	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	4.749.999.870,00
18	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	108.625.152.704,00
19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	424.999.639,00
20	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.436.095.800,00
21	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.797.258.800,00
22	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	4.670.000.000,00



23.	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	280.000.000,00
24	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	175.000.000,00
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.310.573.630,00
26	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.710.206.123,00
27	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.116.357.156,00
28	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.277.225,290,00
29	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.276.768.670,00
30	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	52.997.940,00
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	131.496.660,00
32	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3.567.759.328,00
33	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	401.598.590,00
34	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.510.459.440,00
35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	79.999.800,00
36	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	165.838.234,00
37	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	996.973.655,00
38	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.420.788.029,00
39	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	85.999.990,00
40	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	63.999.990,00
41	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	70.999.790,00
42	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	85.998.960,00
43	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	136.310.050,00
44	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.250.480.911,00
45	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	39.999.840,00
46	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	185.630.912,00
47	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	54.999.970,00



48	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	50.000.000,00
49	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	50.000.000,00
50	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	40.000.000,00
51	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.848.622.510,00
52	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	50.000.000,00
53	URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/ KOTA	50.000.000,00
54	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3.229.461.420,00
55	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B)	188.136.470,00
56	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH	19.1998.380,00
57	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA ,KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH)	72.999.840,00
58	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	21.999.970,00
59	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	62.999.590,00
60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.296.888.730,00
61	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	3.793.015.856,00
62	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	665.250.516,00
63	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	488.488.229,00
64	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	96.447.140,00
65	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	235.999.970,00
66	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.012.797.806,00
67	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.360.869.852,00
68	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	382.998.801,00



69	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	5.346.216.610,00
70	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	355.703.586,00
71	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	9.128.404.870,00
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.936.574.706,00
73	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.661.056.992,00
74	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.692.323.201,00
75	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.790.667.420,00
76	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	582.599.235,00
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	844.996.400,00
78	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	1.924.383.943,00
79	PROGRAM PEMBERAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	305.781.640,00
80	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	50.999.900,00
81	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	319.832.473,00
82	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	270.964.760,00
83	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.886.311.200,00
84	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	31.499.860,00
85	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	173.188.760,00
86	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	345.996.913,00
87	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.071.560,00
88	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.838.438.450,00
89	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	85.784.927,00
90	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.328.761.800,00
91	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	35.999.390,00





92	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	63.995.460,00
93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.999.850,00
94	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.089.339.204,00
95	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	160.432.575,00
96	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.438.449,00
97	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.855.585.498,00
98	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.071.350.950,00
99	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASRANAN PERIKANAN	961.327.670,00
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	399.370.629,00
101	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.647.443.870,00
102	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	254.999.119,00
103	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.488.318.730,00
104	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	199.999.820,00
105	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.555.727.164,00
106	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.388.898.703,00
107	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.466.706.346,00
108	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	391.400.844,00
109	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	71.198.090,00
110	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	171.198.820,00
111	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	303.803.385,00
112	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	2.798.322.030,00
113	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	28.199.770,00
114	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	189.997.782,00



115	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	28.198.140,00
116	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	58.880.000,00
117	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	315.931.960,00
118	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.998.580,00
119	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.990.480,00
120	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.177.099.403,00
121	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	21.454.901.637,00
122	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.990.999.839,00
123	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	19.504.654.695,00
124	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.761.683.673,00
125	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	4.282.482.540,00
126	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	699.983.895,00
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	483.429.798,00
128	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.468.289.979,00
129	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	214.400.488.887,00
130	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.276.224.885,00
131	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.266.013.646,00
132	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.872.687.320,00
133	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.018.664.752,00
134	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	854.549.197,00
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	357.599.119,00
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.117.393.330,00



137	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	881.766.580,00
138	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	247.747.703,00
139	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	41.635.382.030,00
140	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.612.082.468,00
141	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.669.165.840,00
142	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	41.711.080,00
143	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	597.955.762,00
144	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	97.997.090,00
145	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.039.023.342,00
146	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	373.250.424,00
147	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	699.941.589,00
148	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	30.000.000,00
149	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	192.477.771,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.250.650.896.849,00</b>



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi, dimana hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja Instansi Pemerintah, hal itu sejalan dengan Agenda Penguatan Pengawasan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan dilakukannya review atas pencapaian kinerja utama Instansi Pemerintah yang titik beratnya pada Penilaian efektivitas dan efisiensi pencapaian kinerja.

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lkji) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap keberhasilan atau kegagalan capaian target dari indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya, maka digunakan skala pengukuran sebagaimana berikut :

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

No	Kategori	Range Nilai	Kategori
1	AA	90,01-100	Sangat Memuaskan
2	A	80,01-90	Memuaskan
3	BB	70,01-80	Sangat Baik
4	B	60,01-70	Baik
5	CC	50,01-60	Cukup
6	C	30,01-50	Kurang
7	D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : Kemenpan RB

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2022 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari **36 Sasaran** dengan **98 indikator sasaran**.



### 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022

Dalam melaksanakan roda pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 05 tahun 2017 dengan merujuk pada dokumen RPJMD 2017 - 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara umum melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target program dari masing – masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017 – 2022. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka perwujudan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian srategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program / kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu:



**Tabel 3.2**  
**Interprestasi atas Pencapaian Sasaran**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 % sampai 100 %	Baik
3	55 % sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang
5	0	Data tidak ada/ Tidak Lengkap

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam Perhitungan persentase pencapaian target kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Makin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 telah menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan Persentase perbandingan terhadap capaian sasaran terhadap Tahun 2022 dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Perbandingan terhadap Capaian tahun 2022} = \frac{\text{Realisasi 2021} - \text{Realisasi 2022}}{\text{Realisasi 2021}} \times 100\%$$

Persentase capaian terhadap Target Akhir Renstra dihitung dengan rumus sebagai berikut :



$$\% \text{ Capaian terhadap target akhir RPJMD} = \frac{\text{Realisasi 2022}}{\text{Target Akhir RPJMD}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022 dilakukan dengan cara *membandingkan Antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan realisasinya*. Sedangkan perhitungan capaian kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan rumus :

$$\text{: Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 telah melaksanakan kinerja yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 yang terdiri **36 sasaran dan 98 indikator sasaran** yang diharus diwujudkan pada tahun 2022, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi Pertama : Menciptakan Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.</b>						
	MENINGKATNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KINERJA PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK YANG DIDUKUNG SARANA DAN PRASARANA APARATUR DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik yang indeks IKM nya baik.	50%	71,18%	142%	Sangat Baik
		Jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-government.	12 Layanan	11 Layanan	92 %	Baik
2.	MENINGKATNYA PERAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH.	Jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan dan Non perijinan.	4 Jam	4 Jam	100%	Baik
		Hasil Evaluasi LPPD.	Sangat Tinggi	Masih dalam proses penilaian	n/a	Masih dalam proses penilaian
		Hasil Evaluasi Lakip.	BB	Masih dalam proses penilaian	n/a	Masih dalam proses penilaian
		Opini BPK terhadap hasil LKPD.	WTP	WTP	100%	Baik



NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	<b>TERSEDIANYA REGULASI YANG DIPERLUKAN MASYARAKAT.</b>	Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan.	0 (Jumlah Perda )	6 (Jumlah Perda )	600%	Sangat baik
<b>Misi Kedua : Tersedianya Infrastruktur publik yang memadai dan efektif.</b>						
4.	<b>TERPELIHARA DAN TERBANGUNYA INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN.</b>	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik.	80,19%	55,62%	69%	Cukup
		Panjang jembatan dalam kondisi baik.	27,64 M	239 M	865%	Sangat Baik
		Pengembangan Pelabuhan perikanan.	0 Unit	0 unit	0%	Data tidak ada
		Persentase luas irigasi dalam kondisi baik.	93%	72 %	78 %	Baik
		Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan.	3 Unit Gedung OPD	2	67 %	Cukup
			9 Unit kantor lurah	1	11 %	Kurang
			25 Unit kantor desa	1	4%	Kurang
		Persentase pasar tradisional yang tergolong baik.	100 %	88,80%	89%	Baik
Persentase pasar yang memenuhi persyaratan.	75%	50%	66,67 %	Cukup		
5.	<b>MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN (AIR MINUM, AIR BERSIH, SANITASI, SARANA PRASARANA DAN UTILITAS KAWASAN PEMUKIMAN</b>	Penanganan luas kawasan kumuh	14 Ha	0 Ha	0%	Data Tidak ada
		Akses air minum layak	99,07%	69,86%	71%	Cukup
		Sanitasi layak	22%	50,17%	228%	Sangat Baik
		Penanganan desa yang belum dialiri listrik	0 Desa	0	0%	Data Tidak ada
		Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi.	19 Blank Spot	8 Blank Spot	42 %	Kurang
		Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui pemanfaatan TIK.	3Menara	4 Menara	133,33%	Sangat Baik





NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi Masyarakat.</b>						
6.	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.	Jumlah kematian Ibu melahirkan.	0 Jiwa	1 Jiwa	100%	Baik
		Jumlah kematian Bayi.	4 Jiwa	4 Jiwa	100%	Baik
		Angka Harapan Hidup.	67,12%	65%	97%	Baik
7.	MENURUNNYA PREVALENSI KEKURANGAN GIJI.	Prevalensi Balita Giji buruk.	0%	6%	100%	Baik
8.	MENINGKATNYA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT.	Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	100%	107,04 %	107 %	Sangat Baik
9.	MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN KELUARGA BERENCANA.	Rata-rata laju pertumbuhan penduduk.	1,75%	0 %	0 %	Data tidak ada
		Angka Kelahiran Total	1,87 %	0 %	0 %	Data tidak ada
		Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi.	70,25%	54,30 %	77,30 %	Cukup
10.	MENINGKATNYA KEBERDAYAAN, KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK.	Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan.	100%	90 %	90%	Baik
		Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.	100%	92%	92 %	Baik
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
(1)	(2)	(3)	Target	Realisasi	(6)	(7)
<b>Misi Keempat: Menyediakan pendidikan gratis 12 Tahun dan meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.</b>						
11.	MENINGKATNYA PEMERATAAN AKSEBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL.	Rata-rata lama sekolah.	8,83 Tahun	8,86 Tahun	100 %	Baik
		Angka harapan lama sekolah.	13,32 Tahun	13,14 Tahun	99 %	Baik
		Persentase SD yang Akreditasi A.	0,73%	0%	0 %	Data tidak ada
		Persentase SMP yang Akreditasi A.	12,88%	0 %	0 %	Data tidak ada
		Persentase SMA/SMK yang Akreditasi A.	0 %	0	0%	Data tidak ada
12.	TERSEDIANYA BEASISWA BERPRESTASI BAGI MASYARAKAT YANG KURANG MAMPU.	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi penerima Beasiswa.	20 Orang	223 Orang	1115%	Sangat Baik



13.	TERWUJUDNYA PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN KARAKTER/AKHLAK (REVOLUSI MENTAL)	Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter/akhlak (Revolusi Mental)	1 Modul	1 Modul	100%	Baik
14.	MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA DIBERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN.	Jumlah pemuda wirausaha.	60 Orang	9 Orang	0,15%	Kurang
15.	PENINGKATAN UPAYA PEMBIBITAN DAN PENGEMBANGAN PRESTASI OLAH RAGA.	Jumlah Kompetesi Olah Raga.	25 Event	2 Event	0,08%	Kurang
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi Kelima : Menumbuhkan kembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan Sumber Daya Alam (SDA).</b>						
16.	MENINGKATKAN DAYA SAING PELAKU EKONOMI KELOMPOK UMKM DAN KOPERASI YANG BERBASIS POTENSI LOKAL.	Jumlah UMKM	25.650 Unit	18.889 Unit	74%	Kurang
		Jumlah Koperasi	375 Unit	394 Unit	106%	Sangat Baik
		Persentase Koperasi Aktif.	50%	349%	6,98%	Sangat Baik
		Jumlah tenaga kerja UMKM dan Koperasi.	53.300 Orang	53.300 Orang	100%	Baik
			1.272 Orang	1.272 Orang	100%	Baik
		Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk.	25.645 Unit	25.645 Unit	100%	Baik
		Pertumbuhan Industri	4%	25 %	625 %	Sangat Baik
		Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk.	2 Unit	2 Unit	100 %	Baik
17.	MENINGKATKAN PEMBINAAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN UMKM, IKM DAN KOPERASI.	Persentase UMKM dan koperasi yang dibina Pemerintah Daerah.	3 %	3 %	100%	Baik
		Jumlah IKM yang dibina Pemerintah Daerah.	2.398 Unit	2.247 Unit	93,7 %	Baik
18.	MENINGKATKAN AKSES PEMASARAN HASIL INDUSTRI UMKM, IKM DAN KOPERASI.	Jumlah kegiatan Pameran/promosi IKM.	2 Kegiatan	4 Kegiatan	200 %	Sangat Baik



19.	PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP.	Rasio cakupan pengawasan terhadap Amdal.	60%	100%	166,67 %	Sangat Baik
20.	PENANGGULANGAN BENCANA DAN RESIKO BENCANA ALAM.	Rasio penanggulangan Bencana.	52.90 %	100 %	189 %	Sangat Baik
<b>Tahun 2022</b>						
NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi Keenam : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang lestari.</b>						
21.	MENINGKATNYA KERUKUNAN UMMAT BERAGAMA.	Persentase berkurangnya permasalahan isu SARA diKabupaten Tapanuli Tengah.	100%	0%	0%	Data Tidak ada
22.	MENINGKATNYA PELESTARIAN BUDAYA, SITUS DAN CAGAR BUDAYA.	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya.	6 Kegiatan	4	66,67	Cukup
		Sarana penyelenggaraan Seni dan Budaya.	1 Unit	0 Unit	0%	Data Tidak ada
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.	1. Unit.	1. Unit	100%	Baik
23.	MENINGKATNYA NILAI-NILAI PERSATUAN DAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN.	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan.	2 Kegiatan	3 Kegiatan	150%	Sangat Baik
<b>Tahun 2022</b>						
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi Ketujuh : Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat.</b>						
24.	MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG UNTUK INDUSTRI PENGOLAHAN DAN KREATIF.	Cakupan bina kelompok pengrajin.	19 Kelompok	1	5,26 %	Kurang
25.	MENINGKATNYA JUMLAH INVESTASI DAN DUNIA USAHA.	Jumlah PMA	5 Perusahaann	3 Perusahaann	60 %	Kurang
		Jumlah PMDN	16 Perusahaann	102 Perusahaann	638 %	Sangat Baik
		Jumlah jenis perijinan yang dilayani.	101 Jenis	3925 Jenis	3886%	Sangat baik



		Jumlah jenis Non perijinan yang dilayani.	24 Jenis	1 Jenis	4 %	Kurang
26.	MENINGKATNYA PELUANG KERJA BAGI PENDUDUK LOKAL.	Tingkat partisipasi angkatan kerja.	94,91%	75,5 %	79 %	Cukup
		Tingkat pengangguran terbuka.	5,9 %	7,24 %	142%	Sangat Baik
		Tingkat produktifitas tenaga kerja Daerah.	Rp. 13.560.000,-/ Tenaga Kerja.	Rp. 7.284.090,-/ Tenaga Kerja.	53,7 %	Kurang
27.	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS.	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja.	6.36%	20 %	313%	Sangat Baik
		Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenaga kerjaan diperusahaan	90.99%	100%	100 %	Baik
		Tingkat peraturan perusahaan yang disahkan	73%	78%	106 %	Sangat Baik
		Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan	25%	25%	100 %	BAIK
		Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek.	100%	90%	90%	Baik
		Jumlah pekerja buruh yang menjadi anggota Jamsostek.	4.450 Orang	16.806 Orang	377 %	Sangat Baik
		Tingkat perselisihan hubungan industrial.	0.9%	0,5%	55%	Kurang
		Tingkat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah.	0 Jumlah Demonstrasi.	0 Jumlah Demonstrasi	0%	Data Tidak ada
Tingkat LKS biparted diperusahaan.	20%	10 %	50 %	Kurang		
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
			Target	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Misi Kedelapan : Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.</b>						
28.	MENINGKATNYA DESTINASI WISATA.	Jumlah Destinasi wisata yang dibangun.	1 Unit	0 Unit	0%	Data tidak ada
29.	MENINGKATNYA JUMLAH KUNJUNGAN	Jumlah Wisatawan Mancanegara.	306,037 Jiwa	327,165	107%	Sangat Baik



NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
(1)	(2)	(3)	Target	Realisasi	(6)	(7)
	<b>WISATAWAN NUSANTARA (WISNU) DAN WISATAWAN MANCANEGARA (WISMAN)</b>	Jumlah Wisatawan Nusantara.	232 Jiwa	0	0 %	Data tidak Ada
<b>Misi Kesembilan : Tersedianya kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai.</b>						
30.	<b>MENINGKATNYA HASIL PRODUKSI DARI SEKTOR PERTANIAN DAN SEKTOR KELAUTAN.</b>	Jumlah tanaman pangan Padi.	4,78 Ton	4,13 Ton	86,40 %	Baik
		Jumlah tanaman pangan Jagung.	4,91 Ton	2,64 Ton	53,77 %	Kurang
		Luas perkebunan Kelapa Sawit.	10,45 Ha	19,32 Ha	184,88 %	Sangat Baik
		Luas perkebunan Karet.	0,70 Ha	0,95 Ha	135,71 %	Sangat Baik
		Hasil perikanan tangkap.	51.192 Ton	11,26 Ton	23 %	Kurang
		Hasil perikanan Budaya.	194,12 Ton	239 Ton	123 %	Sangat Baik
31.	<b>MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA SEKTOR PERTANIAN DAN KELAUTAN.</b>	Persentase jaringan irigasi yang kondisi baik.	85 %	50 %	70,59%	Cukup
		Persentase jalan desa nelayan kondisi baik.	70 %	60%	85,71%	Baik
		Persentase Alsintan dalam kondisi baik.	65%	60%	92,31%	Baik
		Persentase peningkatan alat tangkap nelayan.	51.192 Ton	11,52 Ton	23%	Kurang
32.	<b>MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS PENYULUH DAN LEMBAGA PENYULUHAN.</b>	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat.	80%	0%	100%	Baik
		Jumlah BPP.	20 Kantor	9 Kantor	45 %	Kurang
33.	<b>TERPENUHINYA JAMINAN SOSIAL BAGI PETANI DAN NELAYAN.</b>	Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial.	60%	40 %	66,67%	Kurang
	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2022		Capaian	Interprestasi
(1)	(2)	(3)	Target	Realisasi	(6)	(7)

**Misi Kesepuluh : Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.**



34.	BERKURANGNYA JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) SERTA TERWUJUDNYA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN HUNIAN VERTIKAL (RUSUNAWA DAN RUSUNAMI) BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR).	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni.	100 Unit	100 Unit	100 %	Baik
		Jumlah Rusunawa	1 Unit	0 Unit	0	Data tidak ada
		Jumlah perumahan nelayan.	50 Unit	0 Unit	0	Data tidak ada
35.	MENINGKATNYA PENYEHATAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN KUMUH.	Menurunnya jumlah luasan kawasan kumuh.	14 Ha	0%	0 %	Data tidak Ada
		Jumlah rumah tangga yang bersanitasi.	0,75 %	0%	0%	Data tidak ada
		Meningkatnya pelayanan air minum.	8,97 %	0%	0%	Data tidak ada
		Meningkatnya jumlah MCK Umum	10 Unit	0%	0%	Data tidak ada
36.	TERSEDIANYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.	Angka kemiskinan	21.878 Orang	30,645	140 %	Sangat Baik
		Jumlah Masyarakat Miskin penerima santunan	4.225 Orang	7612 Orang	180,17%	Sangat Baik

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan rencana kinerja yang telah disajikan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing – masing kelompok indikator sasaran, yaitu kelompok indikator kinerja *input*, *output*, dan *outcome* antara yang direncanakan (diharapkan) sebagaimana tertera pada dokumen perencanaan kinerja dengan realisasinya, atau rencana kinerja (*performance plans*) yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2022. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) atau faktor keberhasilan kinerja sasaran tersebut.

Pada pengukuran capaian kinerja memiliki beberapa sasaran yang lebih kompleks dan dinamis, dimana setiap sasaran melibatkan beberapa OPD terkait sehingga dalam pencapaian sasaran dapat lebih maksimal, karena pembagian tugas yang baik sesuai dengan tupoksi masing-masing OPD sehingga dalam pencapaian sasaran terjadi saling melengkapi antara satu OPD dengan OPD lainnya. Sesuai dengan perencanaan kinerja perubahan yang telah ditetapkan berupa Dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.



Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022, serta dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bersama segenap komponen masyarakat telah berupaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Analisis atas capaian indikator-indikator sasaran ini adalah sebagai berikut:

### ***Misi Pertama: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif***

Menciptakan Pemerintah yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif adalah prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mewujudkan pelayanan Pemerintah yang prima terhadap masyarakat. Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif dapat dicapai dengan menetapkan beberapa sasaran sebagai berikut:

#### **SASARAN 1**

#### **Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)**

Dalam upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung Sarana dan Prasarana Apratur dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai beberapa Program pendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait yaitu :

Dinas PU dan PR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, RSUD Pandan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program penataan administrasi kependudukan dan pengembangan data, program pengembangan/ pengelolaan Implementasi e-Government,

Program pengembangan data/ informasi/ statistik, program pengembangan data/informasi/statistik daerah, program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi, program kerja sama informasi dengan mess media, program pengelolaan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah, program layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah dan program penataan administrasi kependudukan. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:



**Tabel 3.4**  
**Analisis Capaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan Publik yang indeks IKMnya Baik	%	40	39	97,50%	50	71,18	142%	
2	Jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-government	Jumlah	12	8	66,67%	12	11	92%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Persentase pada Indikator Sasaran perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan Publik yang indeks IKMnya Baik adalah 39 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 97,50 % (Kondisi melebihi target). Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 71,18 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 142 %. Selanjutnya capaian indikator sasaran jumlah pelayanan Pemerintah berbasis e-Government pada Tahun 2021 adalah 8 Jumlah dengan persentase pencapaian kinerja 66,67 %, sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 11 Jumlah dengan pencapaian kinerja 92 %(Kondisi melebihi target). Untuk kedua Indikator Sasaran tersebut dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami penurunan. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 1** sebesar 82,08%, dengan Interpretasi **Baik**.

Dalam era Otonomi Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik, salah satu upaya yang dilakukan adalah *e-government*. *e-government* didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak – pihak lain yang berkepentingan melalui pemafaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemanfaatan *e-government* sebagai salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan internal pemerintah sendiri. Di era sistem birokrasi yang rumit dan kaku ini, pemanfaatan *e-government* merupakan salah satu upaya mengatasi sistem birokrasi tersebut.

Berbagai keuntungan dan manfaat yang dapat diperoleh melalui pengembangan *e-government*, di antaranya adalah :

- e-government* dapat menciptakan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi interaksi antar instansi/lembaga, masyarakat dan juga masyarakat internasional;
- e-government* mampu menyediakan sistem manajemen jaringan, sehingga mampu memperpendek lini pengambilan keputusan dan memperluas tentang kendali;
- e-government* dapat mendobrak dinding pemisah antara pemerintah dan masyarakat terutama pemerintah dan sektor swasta, *e-government* dapat membantu pemerintah dalam





memberikan layanan publik dengan lebih informatif, efisien dan efektif;

Kesimpulannya, pemanfaatan *e-government* adalah untuk mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik. Prinsip – prinsip tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yaitu transparansi, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, tatanan hukum yang baik (*rule of law*), ketanggapan, *equality*, visi strategis. Hal inilah merupakan prinsip – prinsip yang harus dicapai dalam pelaksanaan *good governance*. Dari beberapa daerah yang telah lebih dahulu melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik diperoleh hasil secara nyata mampu menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel serta sistem pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Penyebab keberhasilan yang dihadapi selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lancar dan baik;
- b. Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan yang memadai;
- c. Tersedianya ASN yang berkompetensi di bidangnya;
- d. Kerja keras, komitmen segenap ASN dalam hal ini Dinas Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Penyebab kegagalan atau penurunan kinerja serta alternative solusi yang dtelah dilakukan, adalah :

- a. Kurangnya sarana dan prasarana di bidang peliputan, publikasi dan dokumentasi informasi Pemerintah Daerah dan persandian ;
- b. Kurangnya aparatur yang berkompetensi dalam pengelolaan data statistik dan persandian;
- c. Terbatasnya anggaran.

Langkah – langkah yang diambil untuk mengatasi kendala dan hambatan adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana di bidang peliputan, publikasi dan dokumentasi dan persandian;
- b. Mengusulkan penambahan jumlah aparatur yang berkopetensi dalam pengelolaan dara statistik dan persandian;
- c. Mengusulkan penambahan anggaran.

Selama tahun 2022, Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk efisiensi penggunaan Sumber Daya, antara lain :

- a. Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan listrik, lampu, komputer digunakan pada saat jam kerja atau kerja lembur, dan setelah jam kerja selesai langsung dimatikan;
- b. Alat Tulis Kantor digunakan sesuai dengan kebutuhan;
- c. Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional dilaksanakan secara rutin;
- d. Pemeliharaan perlengkapan kantor dilaksanakan secara rutin.

Sistem pemerintahan berbasis elektornik adalah penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media sosial, yakni Youtube, Majalah, website



resmi Kabupaten Tapanuli Tengah. Kendala yang dihadapi : kurangnya animo masyarakat atas informasi yang disampaikan diberbagai media yang disampaikan, belum semua wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki akses internet (*blank spot*), namun ditahun mendatang akan dilaksanakan pembangunan perangkat agar tercapainya internet kepada masyarakat, yakni Pembangunan Menara.

## SASARAN 2

### Meningkatnya Peran Kelembagaan Perangkat Daerah

Dalam upaya peningkatan Peran Kelembagaan Perangkat Daerah, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program peningkatan pelayanan perizinan, program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar, program perencanaan pembangunan daerah, program perencanaan pembangunan ekonomi, program perencanaan sosial budaya, program perencanaan prasarana wilayah dan SDA, program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Analisis Capaian Sasaran 2**  
**Meningkatnya Peran Kelembagaan Perangkat Daerah**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan dan Non perijinan	Hari	8	8	100%	4	4	100%	
2	Hasil Evaluasi LPPD	Nilai	Tinggi	-	100%	Sangat Tinggi	-	(n/a)	Dalam Proses
3	Hasil Evaluasi LAKIP	Nilai	BB	CC	50%	BB	-	(n/a)	Dalam Proses
4	Opini BPK Terhadap Hasil LKPD	Indeks	WTP	WTP	100%	WTP	-	(n/a)	Dalam proses pemeriksaan BPK

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa, pencapaian sasaran meningkatnya peran kelembagaan perangkat daerah dapat dilihat dari 4 (empat) indikator sasaran. Pada inidkator sasaran Jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan dan Non perijinan untuk Tahun 2021 terealisasi 8 hari dari yang ditargetkan juga 8 hari dengan capaian kinerja 100% dan realisasi pada Tahun 2022 adalah 4 hari dari yang ditargetkan 4 hari, sehingga capaian indikator ini adalah 100%. Hasil Evaluasi LPPD, pada Tahun 2021, Kabupaten Tapanuli Tengah peroleh nilai kategori tinggi sehingga persentase capaian kinerja untuk indikator sasaran ini adalah 100%.



Sedangkan untuk Tahun 2022, masih dalam proses penilaian, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini belum dapat ditentukan (n/a). Untuk indikator sasaran hasil evaluasi LAKIP, Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tahun 2021 memiliki target predikat BB mendapat nilai C, sehingga pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2021 adalah 50%, sedangkan untuk hasil evaluasi pada Tahun 2022 masih dalam proses, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini belum dapat ditentukan (n/a). Selanjutnya realisasi indikator opini BPK terhadap hasil LKPD untuk Tahun 2021 adalah WTP, sedangkan pada Tahun 2022 realisasi masih dalam proses penilaian BPK. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 2** sebesar 100%, dengan Interpretasi **Baik**.

LPPD adalah Laporan Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat melalui Gubernur Sumatera Utara sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. LPPD berisi cakupan kinerja berdasarkan indikator kinerja kunci yang merupakan tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah.

Guna menyampaikan laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penyelenggaraan urusan wajib, urusan pilihan, tugas pembangunan dan pelaksanaan otonomi daerah serta memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, telah dilaksanakan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Melalui kegiatan tersebut dihasilkan Buku LPPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta pemuatan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di Website Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Nilai capaian kinerja kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah sebesar 100 persen.

Kendala yang dihadapi dalam penyusunan LPPD adalah OPD kurang merespon permintaan data dari tim penyusun LPPD Kabupaten. Faktor keberhasilan dari meningkatnya peringkat nilai LPPD adalah kemampuan OPD dalam mencapai target yang diminta pada indikator kinerja kunci sehingga pada saat tim EKPPD melakukan evaluasi, tim penyusun dari masing – masing OPD mampu memberikan data pendukung dan jawaban terkait capaian kinerja yang dilakukan masing – masing OPD;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi implementasi SAKIP di suatu instansi baik pemerintah pusat maupun daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) sejak tahun 2014.



Melalui hasil evaluasi tersebut, Kementerian PAN-RB membagi instansi pemerintah menjadi tujuh kategori berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan sasaran perbaikan yang diperlukan. Ketujuh kategori tersebut, yakni :

**Tabel 3.6**  
**Kategori Penilaian SAKIP**

No	Huruf	Kategori	Range Nilai
1	AA	Sangat Memuaskan	90,01-100
2	A	Memuaskan	80,01-90
3	BB	Sangat Baik	70,01-80
4	B	Baik	60,01-70
5	CC	Cukup	50,01-60
6	C	Kurang	30,01-50
7	D	Sangat Kurang	0-30

Sumber : Kemenpan RB-RI

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah bertekad penuh untuk melakukan perbaikan dalam setiap sistem pemerintahan terutama dalam bidang perencanaan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dengan melakukan berbagai kegiatan seperti sinergitas antar OPD yang saling bekerja sama mendukung baik dari segi pemikiran dan pelaksanaan kegiatan. Tekad kuat itupun didorong penuh oleh Bupati Tapanuli Tengah yang memiliki target dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah dari nilai CC menjadi BB. Hal ini tentu bukan tantangan yang mudah dalam perwujudan target tersebut.

Hal lain yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal ini sekretariat daerah adalah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam pembimbingan perbaikan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dalam hal ini yaitu Kementerian PAN-RB. Melakukan beberapa kali Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan Akuntabilitas kinerja dengan mengundang narasumber yang berkompeten di bidangnya, baik narasumber pusat maupun provinsi sehingga memperkaya ilmu dari ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hasil yang diperoleh dari berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja yakni dilakukan perubahan dokumen perencanaan kinerja yang tentu saja berorientasi *outcome*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memperoleh nilai 31,47 atau predikat C Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan anggaran kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :



**Tabel 3.7**  
**Tingkat Akuntabilitas Kinerja**  
**Tahun 2021 dan Tahun 2022**

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2020	2021
<b>A</b>	Perencanaan Kinerja	30	11,83	11,84
<b>B</b>	Pengukuran Kinerja	25	3,44	3,75
<b>C</b>	Pelaporan Kinerja	15	6,25	6,38
<b>D</b>	Evaluasi Internal	10	3,96	4,11
<b>E</b>	Capaian Kinerja	20	5,98	5,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	31,46	31,47
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>C</b>	<b>C</b>

Sumber data : LHE AKIP Kab. Tapanuli Tengah dari Kemenpan 2022

Terdapat beberapa rekomendasi yang disampaikan pada Kemenpan RB, berdasarkan hasil evaluasi, yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum sepenuhnya menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi Tahun 2022, sehingga belum terjadi peningkatan dalam implementasi SAKIP yang signifikan.
2. Kelemahan yang masih dijumpai antara lain sebagai berikut :
  - a. Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan pada dokumen perencanaan pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang ditetapkan tidak memiliki dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat;
  - b. Penjabaran kinerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan sehingga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya kinerja;
  - c. Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
  - d. Pimpinan OPD belum terlibat aktif dalam pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektivitas program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan keputusan atas perubahan strategi jika diperlukan yang dapat menghasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
  - e. Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam laporan kinerja masih terbatas sehingga belum menghasilkan umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya;
  - f. Hasil evaluasi internal SAKIP yang telah dilakukan oleh Inspektorat terhadap OPD belum memacu perbaikan akuntabilitas kinerja secara signifikan.



- g. Rendahnya kualitas implementasi SAKIP mengakibatkan upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum mendukung pencapaian kinerja.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, bertekad untuk memperbaiki kinerja Kabupaten dengan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sehingga target yang ditetapkan untuk tahun selanjutnya bahkan meningkatkan realisasi dari target yang telah ditetapkan akhir RPJMD 2022, seperti pelaksanaan Bintek dan Sosialisais yang berkelanjutan kepada OPD agar dapat melaksanakan LAKIP dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui BPKPAD dan Inspektorat berusaha mencapai target indikator kinerja sasaran yang telah disepakati pada awal tahun kerja sampai akhir periode perencanaan strategis yaitu memperoleh opini WTP atas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kecukupan dalam penyajian data sesuai dengan ketentuan dan menindaklanjuti setiap temuan pemeriksaan intern dan terinci oleh pemeriksa dari tahun ke tahun sampai dengan akhir periode perencanaan strategis.

Faktor pendukung pencapaian Opini WTP adalah apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi kriteria penilaian Opini BPK, yaitu :

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
2. Kecukupan Pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Bukanlah hal yang mudah dalam Pencapaian Opini WTP, sehingga terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka Pencapaian Opini WTP, yakni :

1. Kelmahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan (SAP) dimana pejabat yang bertanggungjawab belum optimal memahami akuntansi dan Pelaporan terutama Pejabat Penata usaha Keuangan, penyusun anggaran kurang cermat dalam menelaah penganggaran pendapatan dan belanja, sehingga belum sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kelmahan sistem Pengendalian Internal pada OPD;
3. Masih banyak ASN yang belum sepenuhnya paham dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola keuangan, sesuai peraturan yang ada;
4. Tidak lengkapnya dokumen administrasi dan bukti transaksi keuangan

Untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik, transparan dan akuntabel ada beberapa hal yang perlu dilakukan dengan memperhatikan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun mendatang, adalah:

1. Perbaikan, penyempurnaan sistem/ kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat.
2. Melaksanakan inventarisasi aset daerah.
3. Sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dan diaplikasikan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**SASARAN 3****Tersedianya Regulasi tentang pelayanan publik**

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Bagian Hukum dan Orta. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program penataan peraturan perundang-undangan. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.8**  
**Analisis Capaian Sasaran 3**  
**Tersedianya Regulasi tentang pelayanan publik**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan	Jumlah	0	0	0%	0	6	600%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi “Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan” adalah 0 Perda dengan persentase pencapaian adalah 0% Sedangkan pada Tahun 2022 target adalah 0, sedangkan realisasi capaian adalah 6 Perda, sehingga persentase pencapaian Indikator Sasaran adalah 0%, Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 3** sebesar 600 %, dengan Interpretas **Sangat Baik**.

**Misi Kedua: Tersedianya Infrastruktur Publik yang Memadai dan Efektif**

Peningkatan infrastuktur transportasi yang terintegrasi dalam pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Daerah dapat dicapai melalui salah satu langkah yaitu semakin giatnya perbaikan fasilitas infrastruktur.

**SASARAN : 4.****Terpelihara dan terbangunnya infrastuktur sosial, ekonomi dan pemerintahan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor : 03/PRT/M/2012 tentang pedoman penetapan fungsi jalan dan status jalan bahwa jaringan jalan adalah kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hieraki.

Dalam upaya peningkatan Infrastruktur jaringan jalan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas PU dan PR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi dan UKM. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Penataan Ruang, Program penataan bangunan dan lingkungannya, Program Penataan bangunan dan gedung, Program peningkatan sarana distribusi, Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Program penerangan jalan dan lingkungan, Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.



Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.9**  
**Analisis Capaian Sasaran 4**  
**Terpelihara dan terbangunnya infrastuktur sosial, ekonomi dan pemerintahan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	75,19	54,14	72%	80,19 %	55.62 %	96%	
2	Panjang jembatan dalam kondisi baik	M	27,64	27,64	100%	27.64	239	865%	
3	Pengembangan pelabuhan perikanan	Unit	1	0	0	0	0	0	
4	Persentase luas irigasi dalam kondisi baik	%	91	70,34	77,30%	93	72%	78%	
5	Pembangunan gedung perkantoran pemerintahan	Gedung OPD (unit)	2	3	150%	3	2	67%	
		Kantor Lurah (unit)	9	0	0%	9	1	11%	
		Kantor Desa (unit)	25	1	4%	25	1	4%	
6	Persentase Pasar tradisional yang tergolong baik	%	88,8	99,36	132,43%	100	88,80	89%	
7	Persentase Pasar yang memenuhi persyaratan	%	66	98,76	131,68%	75	50	66,67%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi baik adalah 54,14 dengan persentase pencapaian adalah 72% Sedangkan pada Tahun 2022 target dalah 80,19 % sedangkan realisasi capaian adalah 55.62 % sehingga persentase pencapaian kinerja indikator sasaran adalah 96 % Selanjutnya capaian kinerja indikator sasaran Panjang jembatan dalam kondisi **Baik**, pada Tahun 2021 adalah 100%. dan pada Tahun 2022 sebesar 865 %, selanjutnya capaian kinerja indikator pengembangan pelabuhan perikanan pada Tahun 2021 adalah 0% dan tingkat capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 0%, hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan pelabuhan perikanan. Selanjutnya capaian kinerja indikator sasaran “Persentase luas irigasi dalam kondisi **Baik**” di Tahun 2021 sebesar 91 % dan pada Tahun 2022 adalah sebesar 93 % Indikator sasaran “Pembangunan gedung perkantoran Pemerintahan” pada Tahun 2021 tingkat capaian kinerja untuk gedung OPD 150 %, untuk kantor lurah adalah 0% dan untuk kantor desa adalah 4 %, dan pada Tahun 2022 untuk pembangunan gedung OPD 67 %, untuk pembangunan kantor lurah 11 % ( pembangunan tidak ada) untuk pembangunan kantor desa 4% (karena pembangunan tidak ada ). Selanjutnya tingkat capaian kinerja indikator sasaran “Persentase pasar tradisional yang tergolong baik" pada Tahun 2021 sebesar 99,36% dan Tahun 2021 tingkat capaiannya 132,43%. Selanjutnya capaian indikator “Persentase pasar yang memenuhi persyaratan” pada Tahun 2022 adalah sebesar 89% dan pada Tahun 2022 tingkat capaian kinerja indikator ini sebesar 66,67% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 4** sebesar 182,38% dengan Interpretasi **Sangat Baik**.





Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan Kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan Tahun 2022 dengan nilai yang di Alokasikan APB sebesar Rp. 104.950.974.015,00 ( Seratus empat milyar Sembilan ratus lima puluh Sembilan ratus tujuh puluh empat lima belas rupiah ) dan Alokasi dana pasca perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 178.510.753.466,00 ( Seratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rupiah ) dengan realisasi Keuangan sampai akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 175.040.021.134,00 ( Seratus tujuh puluh lima Milyar empat puluh ribu dua puluh satu ribu seratus tiga puluh empat rupiah ) atau sebesar 98,06 %.

## SASARAN 5

### **Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (Air minum, air bersih, sanitasi, dan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman)**

Dalam upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, PDAM Muall Nauli dan PDAM Tirtanadi.

Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA ), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Drainase, Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, dan program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Analisis Capaian Sasaran 5**  
**Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan permukiman (Air minum, air bersih, sanitasi, dan prasarana, sarana dan utilitas kawasan permukiman)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Penanganan luas kawasan kumuh	Ha	14	0	0%	14	0	0%	
2	Akses air minum layak	Persentase sambungan rumah	90,10	98,85	109,71%	99,07	69,86	71%	
3	Sanitasi layak	Persentase sambungan rumah tangga	21,25	99,92	470%	22	50,17	280%	
4	Penanganan desa yang belum dialiri listrik	Desa	0	0	0%	0	0	0%	
5	Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi	Blank spot (Desa)	21	26	123,81%	19	8	42%	
6	Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui pemanfaatan TIK	Menara	3	8	266,66%	3	4	133,33%	



Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Penanganan luas kawasan kumuh adalah 0 Ha dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 0 Ha, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0% Selanjutnya capaian indikator sasaran Akses air minum layak pada Tahun 2021 adalah 98,85 Persentase sambungan rumah dengan persentase pencapaian kinerja adalah 109,71 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 98,85 Persentase sambungan rumah dengan pencapaian kinerja 109,71% Selanjutnya capaian indikator sasaran Sanitasi layak pada Tahun 2021 adalah 99,92% Persentase sambungan rumah tangga dengan persentase pencapaian kinerja adalah 470 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 50,17 Persentase sambungan rumah tangga dengan pencapaian kinerja 280 % Selanjutnya capaian indikator sasaran Penanganan desa yang belum dialiri listrik pada Tahun 2021 adalah 0% Desa dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Desa dengan pencapaian kinerja 0%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Meningkatnya jangkauan layanan telekomunikasi pada Tahun 2021 adalah 26 Blank spot (Desa) dengan persentase pencapaian kinerja adalah 123,81 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 8 Blank spot (Desa) dengan pencapaian kinerja 42 %. Selanjutnya capaian indikator sasaran Peningkatan kualitas layanan publik pemerintah melalui pemanfaatan TIK pada Tahun 2021 adalah 8 Menara dengan persentase pencapaian kinerja adalah 266,66 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 4 Menara dengan pencapaian kinerja 133,33 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 5** sebesar 87,72% dengan Interpretasi **Baik**.

Pada Tahun 2022 ditargetkan 3 menara telekomunikasi terbangun, dan target tersebut dapat tercapai. Atas keputusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai berikut :

1. Menara Telekomunikasi Bersama di Lingkungan II Kelurahan sibuluan nauli Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, SK- PBG-120103-25072022-0 Tanggal 25 juli 2022
2. Menara Telekomunikasi di Desa Teluk Roban Kecamatan Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah ,SK- PBG-120102-12092022-0 Tanggal 12 September 2022
3. Menara Telekomunikasi PT. Profesional Telekomunikasi Indonesia Dusun II Desa Saragi Kecamatan Manduamas Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 01/DPMPTSP/2022 Tanggal 24 April 2022.

***Misi Ketiga: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Dasar yang Bermutu bagi Masyarakat***

## **SASARAN 6**

### **Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat**

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Kesehatan dan RSUD Pandan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.



Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.11**  
**Analisis Capaian Sasaran 6**  
**Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah kematian ibu	Jiwa	2	1	50%	0	1	100%	
2	Angka kematian bayi	Jiwa	4	3	75%	4	4	100%	
3	Angka harapan hidup	%	100,3%	67,02	100%	67,12	60%	97%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi indikator “Jumlah kematian Ibu melahirkan” adalah 1 jiwa dengan persentase pencapaian adalah 50%. Sedangkan pada Tahun 2022 target 0 jiwa dan terealisasi 1 jiwa, pencapaian indikator sasaran adalah 100%. Selanjutnya capaian indikator sasaran “Angka kematian bayi” pada Tahun 2021 adalah 75 %, dan pada tahun 2022 sebesar 100%.

Tingkat capaian indikator sasaran “Angka Harapan Hidup” pada tahun 2021 adalah 100% dan Tahun 2022 sebesar 97 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 6** sebesar 99 % dengan Interpretasi **Baik**.

Untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022, Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Fasilitas penyediaan rujukan yang terstandarisasi yang didukung ketersediaan sumber daya kesehatan yang kompeten, obat dan teknologi yang ade kuat;
2. Fokus penyediaan pelayanan Kesehatan dasar terstandar berdasarkan disparitas wilayah, gender dan keteringgalan sumber daya kesehatan;
3. Pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak, kesehatan Reproduksi dan KB di pelayanan kesehatan dasar;
4. Meningkatkan kualitas data dan informasi kesehatan dan penyediaan data dan informasi publik secara berkala;
5. Meningkatkan pengendalian penyakit menular terutama penyakit menular reemerging, new emerging yang berpotensi pandemi;
6. Meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan primer dan skunder kesehatan pada daerah sulit dan daerah bermasalah kesehatan;
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi dan registrasi tenaga kesehatan.

## **SASARAN 7**

### **Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi**

Dalam rangka untuk mengupayakan penurunan Prevalensi kekurangan Gizi, Kabupaten Tapanuli Tengah berusaha membuat beberapa program sebagai pendukung sasaran yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan RSUD Pandan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Manusia ( UKBM ) Tingkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.



Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.12**  
**Analisis Capaian Sasaran 7**  
**Menurunnya Prevalensi kekurangan Gizi**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Prevalensi Balita gizi buruk	%	1	18	4,3%	0	6	100%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Indikator sasaran “Prevalensi balita gizi buruk” adalah 18 % dengan persentase pencapaian adalah 4,3 %. Sedangkan pada Tahun 2022 target sebesar 0 terealisasi 6 tingkat pencapaian indikator sasarannya adalah 100% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 7** sebesar 100 %, dengan Interpretasi **Kurang**.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan. Aspek strategis yang dimiliki oleh RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pengembangan RSUD Pandan adalah sebagai berikut :

1. Strength (kekuatan) dan Opportunity (Peluang) :
  - a. Ada tugas pokok dan fungsi yang jelas di rumah sakit.
  - b. Ada fasilitas canggih yaitu CT-Scan, Haemodialisa, Fisioterapi, X-Ray, Bronhoscopi, Ventilator, USG, Ruang Khusus TB Paru, Farmasi dan Laboratorium, dan Peralatan Kesehatan Lainnya.
  - c. Ambulance yang cukup untuk mendukung pelayanan sebanyak 5(lima) unit, dan Ambulance Jenazah 1 (satu) unit.
  - d. Status RSUD Pandan yang telah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
  - e. Lokasi RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada jalur lintas Sumatera dan dekat dengan objek pariwisata di Tapanuli Tengah.
  - f. Pembangunan gedung baru RSUD Pandan yang pada saat ini telah memiliki kapasitas 120 tempat tidur.
  - g. RSUD Pandan saat ini telah terakreditasi sebagai Rumah Sakit Tingkat Utama dengan nomor sertifikat : KARS-SERT/1385/XII/2019
2. Weakness (kelemahan) dan Threat ( hambatan) :
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan masih memiliki keterbatasan SDM Aparatur yaitu masih terbatasnya dokter spesialis yang menetap di RSUD Pandan, sehingga harus mendatangkan dokter spesialis Non PNS, Tenaga Terampil Medis Keahlian Khusus juga masih kurang sehingga perlu dikirimkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kembali.
  - b. Motivasi, Kuantitas, dan kualitas pengelola keuangan Rumah sakit Umum Daerah Pandan masih relatif rendah sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan peraturan yang berlaku khususnya pengelolaan keuangan secara maksimal.
  - c. Pelayanan Rumah Sakit belum maksimal baik dari segi administrasi pengelolaan keuangan maupun pelayanan medis.



- d. Pembangunan Gedung RSUD Pandan belum selesai dilaksanakan sesuai dengan Masterplan Rumah Sakit, hal ini mengakibatkan penempatan pelayanan kesehatan belum sesuai dengan standar RSUD kelas C dan Peralatan kesehatan belum memadai (Penunjang Diagnostik, Beadah, dll).
- e. Meningkatkan penanganan kasus gizi buruk dan kuarang melalui penyediaan makanan tambahan, pendampingan kasus dan pemantauan status gizi.

## SASARAN 8

### Meningkatnya Jaminan kesehatan masyarakat

Dalam rangka untuk meningkatkan upaya Jaminan kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan RSUD Pandan. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program upaya kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/ pustu dan jaringannya, program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial masyarakat, program peningkatan pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo, program peningkatan obat dan perbekalan kesehatan, program pengawasan obat dan makanan, program pengembangan lingkungan sehat, program pengembangan obat asli Indonesia, program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan dan program pelayanan kesehatan penduduk miskin. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
**Analisis Capaian Sasaran 8**  
**Meningkatnya Jaminan kesehatan masyarakat**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2021	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	90	90	100%	100	167,04	167 %	

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi indikator sasaran "Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)" adalah 90% dengan persentase pencapaian adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 target 100 % realisasinya adalah 167,04 % tingkat pencapaian adalah 107 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 8** sebesar 167 %, dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Dalam pelaksanaan kegiatan masih ditemukan berbagai hambatan dan kendala yang berpengaruh besar terhadap pencapaian dari setiap kegiatan yang telah ditetapkan diantaranya:

- a. Kualitas SDM juga masih belum memadai baik dilihat dari segi kuantitas maupun kualitas serta jenjang pendidikan yang ditamatkan, dimana SDM yang berkompeten serta memiliki disiplin tinggi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan program-program kesehatan terutama dalam bidang tugasnya masing-masing.



- b. Peran serta dari lintas sektor dan masyarakat umumnya masih belum maksimal, sehingga sebagian besar kegiatan kesehatan asumsinya masih menjadi tanggung jawab petugas kesehatan saja.
- c. Kondisi geografis daerah yang masih banyak penduduknya tinggal di daerah kepulauan dan terpencil sehingga menyulitkan petugas untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat, tersebut selain itu masyarakat juga sulit untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan.
- d. Sistem informasi kesehatan belum berjalan dengan baik dikarenakan sarana pendukung dalam pengelolaan data yang belum memadai, selain itu perhatian dan tanggung jawab petugas dalam mengelola data masih kurang, kemudian tenaga yang terampil dalam pengelolaan data juga belum ada.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk masa-masa mendatang demi tercapainya keseluruhan program-program kesehatan sebagai berikut :

- a. Penegakan disiplin petugas kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing agar lebih aktif lagi sesuai dengan tanggung jawabnya serta mempertimbangkan Kemampuan/keahlian dalam penempatan dan memperdayakan pegawai.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kerjasama SDM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung terlaksananya program/kegiatan.
- c. Penegakan komitmen bersama dan konsistensi tindakan dalam setiap pelaksanaan keputusan dan tindakan.
- d. Meningkatkan advokasi kepada *stakeholder* dan mengambil keputusan guna dukungan dalam setiap kegiatan upaya kesehatan.
- e. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang difasilitasi dengan jaringan internet sehingga setiap data-data kesehatan dapat dengan mudah diakses oleh setiap yang membutuhkan, selain itu diupayakan data yang akurat yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kesehatan.
- f. Pengembangan sarana dan prasarana kesehatan serta melengkapi peralatan medis dan non medis di setiap sarana pelayanan kesehatan guna peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi kesehatan.
- g. Meningkatkan peran serta masyarakat melalui penyuluhan-penyuluhan dan motivasi langsung oleh para petugas kesehatan kepada masyarakat.
- h. Meningkatkan upaya promosi kesehatan melalui kerjasama/kementiaan, kelembagaan, perilaku hidup bersih dan sehat melalui fasilitas dan advokasi desa sehat, dan peningkatan usaha kesehatan berbasis masyarakat
- i. Perluasan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat untuk mencapai *universal coverage*

## **SASARAN 9**

### **Meningkatnya Kualitas Layanan Keluarga Berencana**

Dalam upaya peningkatan kualitas layanan keluarga berencana, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pengendalian Penduduk dan KB. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pengendalian Penduduk,



Program Pembinaan Keluarga Berencana ( KB ), Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera ( KS

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**Analisis Capaian Sasaran 9**  
**Meningkatnya Kualitas Layanan Keluarga Berencana**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata-rata pertumbuhan penduduk	%	1,76	1	56,82%	1,75	0	0%	
2	Angka kelahiran total	%	1,89	4,1	216,93%	1,87	0	0%	
3	Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi	%	70,20	70,10	99,86%	70,25	54,30	77%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi “Rata-rata pertumbuhan penduduk” adalah 1 % dengan persentase pencapaian adalah 56,82 %. Sedangkan pada Tahun 2022 target dalah 1,75 % dan realisasinya adalah 0 % sehingga persentase pencapaian indikator sasaran ini adalah 0% Selanjutnya capaian indikator sasaran “Angka kelahiran total” pada Tahun 2021 adalah 216,93 %. dan pada Tahun 2022 sebesar 0 % dan tingkat capaian indikator sasaran “Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi” untuk Tahun 2021 sebesar 99,86 sedangkan tingkat capaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2022 adalah sebesar 77 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 9** sebesar 25,67 % dengan Interpretasi **Kurang**

#### SASARAN 10

#### Meningkatnya keberdayaan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak

Dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan KPAID. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG), Program Penyediaan layanan Rujukan lanjutan bagi perempuan, korban kekerasan, Program pengumpulan ,pengolahan ,analisis penyajian data gender dan anak, program penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hiodup anak,program penyedia bagi anak yang memerlukan perlindungan ,program penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi anak .

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.15**  
**Analisis Capaian Sasaran 10**  
**Meningkatnya keberdayaan kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%	90	81	90 %	100%	90	90	
2	Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	%	90	90	100%	100	92	92%	

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi indikator sasaran “Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan”



adalah 81 % dengan persentase pencapaian adalah 90 %. Sedangkan pada tahun 2022 target adalah 100 sedangkan,realisasinya adalah 90 tingkat capaian indikator sasaran adalah 90% Selanjutnya tingkat capaian indikator sasaran “Cakupan penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak” pada tahun 2021 tercapai 90% dan pada tahun 2022 tingkat capaiannya 90% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 10** sebesar 91 % dengan Interpretasi **Baik**

Dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah telah merencanakan berbagai macam program dan kegiatan untuk mencapai target – target indikato kinerja sasaran strategis. Program dan kegiatan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan . Analisis terhadap pencapaian sasaran strategis diukur dengan menggunakan indikator kinerja ini merupakan tingkat hasil dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan terhadap capaian sasaran akan tergantung pada keberhasilan atau kegagalan pada pelaksanaan program dan kegiatan.

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Tengah.

1. Kegiatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten /Kota
2. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten /Kota.
4. Kegiatan Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten /kota.
5. Kegiatan Pengumpulan ,Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di tingkat Daerah Kabupaten /Kota.

***Misi Keempat: Menyediakan Pendidikan Gratis 12 Tahun dan Meningkatkan Mutu Pendidikan yang Memiliki Daya Saing***

**SASARAN 11**

**Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh konstitusi tersebut pada pasal 20, pasal 21, pasal 28 c ayat (1), pasal 31 dan pasal 32 mengamatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dan memajukan kebudayaan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu indikator yang menunjukkan peningkatan pemerataan akses pendidikan adalah **angka rata-rata lama sekolah (ARLS)**, yang dapat diartikan berapa lama penduduk usia 25 tahun keatas bersekolah dalam suatu daerah. Untuk usia 7-12 tahun adalah Sekolah Dasar, usia 13-15 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah usia 16-18 tahun dan Sarjana usia 19-24 tahun, artinya lama sekolah SD sampai SMP adalah 9 tahun, SM adalah 3 tahun dan Sarjana adalah 5 tahun.





Dengan demikian jika seorang penduduk tamat sarjana maka lama sekolahnya adalah 17 tahun. Pemerintah telah menetapkan Program Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga diharapkan tidak ada lagi penduduk yang tidak tamat Sekolah Menengah (SM). Program ini juga sangat mendukung agar kiranya semua penduduk Tapanuli Tengah sudah melek huruf. Kabupaten Tapanuli Tengah menetapkan target angka rata-rata lama sekolah tahun 2022 sebesar 8,33 tahun.

Upaya peningkatan pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pendidikan. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program Pengelolaan Pendidikan,.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Analisis Capaian Sasaran 11**  
**Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,43	8,84	104,86%	8,83	8,86	100%	
2	Angka harapan lama sekolah	Tahun	13,18	13,18	99,16%	13,32	13,14	99%	
3	Persentase SD yang Akreditasi A	%	0,72	0,70	98,59%	0,73	0	0%	
4	Persentase SMP yang Akreditasi A	%	12,87	12,90	99%	12,88	0	0%	
5	Persentase SMA/ SMK yang Akreditasi A	%	26,14	13,56	51,89%	0	0	0	

Dari tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Rata-rata lama sekolah adalah 8,84 % dengan persentase pencapaian adalah 104,86 %. Sedangkan pada Tahun 2022 target dalah 8,83%, sedangkan realisasinya 8,86 % sehingga persentase pencapaian indikator sasaran ini adalah 100 % Selanjutnya capaian indikator sasaran Angka harapan lama sekolah pada Tahun 2021 adalah 13,18 %. dan pada Tahun 2022 sebesar 13,14 % dan tingkat capaian indikator sasaran Persentase SD yang Akreditasi A untuk Tahun 2021 sebesar 0,70 %, sedangkan tingkat capaian kinerja indikator sasaran di Tahun 2022 adalah sebesar 0 % Selanjutnya capaian Persentase SMP yang Akreditasi A untuk Tahun 2021 sebesar 12,90% dan pada Tahun 2022 capaiannya sebesar 0 % Tingkat capaian indikator sasaran Persentase SMA/ SMK yang Akreditasi A ditahun 2021 sebesar 13,56 % dan pada Tahun 2022 capaian indikator sasaran ini adalah 0 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 11** sebesar 99,56 % dengan Interpretasi **Baik**.

Faktor Pendukung dari tercapainya target angka rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)  
Dengan adanya BOS, bantuan untuk masyarakat dalam bentuk Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)
2. Pemberian bantuan beasiswa kepada siswa/mahasiswa yang berprestasi
3. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan\
4. Pemberian tunjangan sertifikasi guru.

**SASARAN 12****Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu**

Dalam upaya peningkatan beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pendidikan, yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.17**  
**Analisis Capaian Sasaran 12**  
**Tersedianya beasiswa berprestasi bagi**  
**masyarakat yang kurang mampu**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi penerima beasiswa	Orang	15	123	820%	20 orang	223	1.115%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah mahasiswa kurang mampu yang berprestasi penerima beasiswa adalah 123 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 820 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 223 orang, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 1.115 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 12** sebesar 1.115 % dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sangat memperhatikan pendidikan bagi anak yang kurang mampu dalam melanjutkan tingkat pendidikan SMA dan Perkuliahan. Dimana pada tabel diatas dapat dilihat melebihi dari pada target.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Tapanuli Tengah, pada Tahun 2022 melalui Dana APBD diberikan Beasiswa yang diperuntukkan bagi Masyarakat yang lulus masuk ke Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari masyarakat kurang mampu dan ekonomi kecil.

Untuk Tahun 2022 Pemerintah menyediakan sebanyak 223 orang beasiswa dengan besaran Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah), per orang selama 4 – 5 Tahun, dengan persyaratan tersebut dibawah ini :

1. Untuk memperoleh beasiswa ini, adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 30 Tahun 2019, yaitu
2. Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau asal keluarga di Kabupaten Tapanuli Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) atau Keterangan resmi lainnya.
3. Mahasiswa yang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia, kecuali fakultas/jurusan Kedokteran.



4. Diutamakan mahasiswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Ketua RT/Lurah/Kepala Desa setempat, dan diperkuat dengan kuitansi atau bukti pembayaran rekening listrik/air/telepon.
5. Terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa disertai Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan. Bagi Mahasiswa baru, harus dilengkapi dengan surat keterangan diterima sebagai mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri.
5. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain, baik Pemerintah (Pusat dan Daerah) maupun swasta dalam maupun luar negeri dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh pejabat pihak sekolah atau perguruan tinggi.
6. Bukan CPNS/PNS, Karyawan BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta Asing/Perusahaan Swasta lainnya.
7. Melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan khusus.
8. Diseleksi dan diverifikasi oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan disesuaikan dengan kuota yang tersedia.

Adapun dari 223 orang penerima beasiswa dari Bupati Tapanuli Tengah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 2065/KESRA/2021 tanggal 14 Oktober 2021 diantaranya yaitu :

1. Khairiyah Wahyuni Hasian Hutabarat berasal dari Jl. Padang sidimpuan ,Lk.III Dusun III Kecamatan Sarudik , Universitas Imam Bonjol padang
2. Dessy Sitompul berasal dari Lk.IV.Tukka Dolok Kelurahan Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik.
3. Putri Febiola berasal dari Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam, IAIN Bukit tinggi
4. Sri kandayani berasal dari Desa Sorkam Tengah Kecamatan Sorkam UIN Imam Bonjol Padang
5. Siti Aisyah Nasution berasal dari Lk.IV Tukka Dolok Kel.Sibuluan Nalambok Kecamatan Sarudik Universitas Syiah Kuala .
6. Gerald Frist Mont Hutagalung berasal dari Desa Pelita Kecamatan Sorkam, IAIN Universitas Jambi.
7. Wendy Sutrio Situmeang berasal dari Lk.I Pargarutan Kecamatan Sorkam Universitas Palangkaraya.
8. Mikhael Dwi Putra Zebua berasal dari Lk.IV Sibarubg-barung Kel sipange Kecamatan Tukka, Universitas Udayana.
9. Muhammad Alinafiyah Tanjung berasal dari jln Dangol L.Tobing Kecamatan Pandan, Universitas Riau.
10. Alexander Downer Rodotua Iburian berasal dari Lk.II Barung –Barung Kecamatan Tapan Nauli , Institut Teknologi Sumatera.

### **SASARAN 13**

#### **Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter/ akhlak (revolusi mental)**

Dalam upaya peningkatan pendidikan karakter/ akhlak (revolusi mental), Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni:

Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu,



Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, program perbaikan sistem administrasi kearsipan, program peningkatan sistem administrasi, penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah, program peningkatan kualitas pelayanan informasi, program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan, program pendidikan non formal dan program peningkatan kapasitas sumber daya ASN. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Analisis Capaian Sasaran 13**  
**Terwujudnya pengintegrasian pendidikan**  
**karakter/ akhlak (revolusi mental)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter/ akhlak (revolusi mental)	Modul	1	1	100%	1	1	100%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah mata pelajaran pendidikan karakter/ akhlak (revolusi mental) adalah 1 Modul dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 1 Modul, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 13** sebesar 100%, dengan Interpretasi **Baik**.

Pada hakikatnya pendidikan merupakan upaya membangun budaya dan peradaban bangsa. Oleh karena itu, UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. Pemerintah terus-menerus memberikan perhatian yang besar pada pembangunan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan Negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang pada gilirannya sangat mempengaruhi kesejahteraan umum dan pelaksanaan ketertiban dunia. Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial.

#### SASARAN 14

##### Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan

Dalam upaya peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Analisis Capaian Sasaran 14**  
**Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah pemuda wirausaha	Orang	50	0	0%	60	9	0.15	



Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah pemuda wirausaha adalah 60 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 9 orang, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0,15 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 14** sebesar 0.15 %, dengan Interpretasi **Kurang**

### SASARAN 15

#### Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

Dalam upaya peningkatan pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.20**

#### Analisis Capaian Sasaran 15

##### Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Kompetisi Olahraga	Event	24	0	0	25	2	0,08%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah Kompetisi Olahraga adalah 0 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 2 orang, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0,08 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 15** sebesar 0,08 % dengan Interpretasi **Kurang**

Dalam menjalankan urusan Kepemudaan dan Olahraga banyak kendala dan Permasalahan yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga antara lain :Minimnya sarana dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah sehingga menyulitkan dalam melakukan pertandingan/perlombaan bidang keolahragaan.

1. Minimnya anggaran dana untuk melakukan pembinaan atlit pelajar.
2. Minimnya anggaran dana untuk melaksanakan pertandingan/perlombaaan berbagai jenis cabang olahraga tingkat pelajar.
3. Minimnya jumlah pelatih yang berlisensi.
4. Kurangnya penghargaan bagi Pelatih/Atlit Olahraga yang berprestasi.
5. Rendahnya tingkat kemajuan Pembangunan Olahraga.
6. Minimnya anggaran pendanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan.

Menanggapi permasalahan diatas perlu adanya penanganan yang dilakukan untuk mengatasi dan memecahkan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengadakan Koordinasi berkelanjutan dengan OKP dan Pengcab Olahraga dengan keterbatasan dana.
2. Mengirim pelatih atau guru olahraga untuk mengikuti pelatihan.
3. Melaksanakan event-event olahraga sesuai kemampuan dana.



4. Mengikutkan semua elemen masyarakat dalam kegiatan olahraga sehingga animo masyarakat terhadap olahraga semakin meningkat.
5. Berkoordinasi dengan Kepala Sekolah agar memaksimalkan guru-guru olahraga disekolah dalam melakukan pembinaan terhadap pelajar.
6. Ditambahnya anggaran pembiayaan untuk kegiatan pembinaan pemuda.
7. Perlunya dilakukan pendataan organisasi kepemudaan sebagai database pembinaan pemuda.

**Misi Kelima: Menumbuhkembangkan Perekonomian Rakyat Menuju Kedaulatan Sumber Daya Alam Berkarakter**

**SASARAN 16**

**Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi local**

Dalam upaya peningkatan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi lokal, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program penciptaan iklim usaha-usaha kecil dan menengah yang kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah, Program Pengembangan System Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro kecil Menengah, Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, Program Pengembangan sarana dan prasarana jaringan usaha koperasi, Program Pemberdayaan UMKM, Program pembinaan dan pengembangan KUMKM yang berwawasan lingkungan, Program fasilitas Akta pendirian koperasi

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Analisis Capaian Sasaran 16**  
**Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi local**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah UMKM	Unit	25.535	25.535	100%	25.650	18,889	74%	
2	Jumlah Koperasi	Unit	371	371	100%	375	394	106%	
3	Persentase Koperasi aktif	%	47	47	100%	50%	347%	694%	
4	Jumlah Tenaga Kerja UMKM dan Koperasi	Orang	53.070	53.070	100%	53.300	53.300	100%	
		Orang	1.263	1.263	100%	1.272	1.272	100%	
5	Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Orang	25.530	25.530	100%	25,645	25.654	100%	
6	Pertumbuhan industri	%	3,8	99,68	132,82%	4	2,5	625%	
7	Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk	Unit	2	6	300%	2	2	100%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah UMKM adalah 25.535 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100 %.



Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 25.650 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 74 % Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah Koperasi pada Tahun 2021 adalah 371 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 394 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 106% Selanjutnya capaian indikator sasaran Persentase Koperasi aktif pada Tahun 2021 adalah 47 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 50 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 694 %. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah tenaga kerja UMKM dan Koperasi pada Tahun 2021 adalah 53.070 orang dan 1.263 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100% dan 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 53.300 orang 1.272 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100% dan 100%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk pada Tahun 2021 adalah 25.530 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 25.654 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Pertumbuhan industri pada Tahun 2021 adalah 3,8% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 132,82%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 25% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 625% Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah IKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk pada Tahun 2021 adalah 6 unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 300%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 2 unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 16** sebesar 271,29% dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai 371 unit koperasi dan jumlah UMKM mencapai 25.535. Jumlah Koperasi dan UMKM tersebut menjadi potensi sekaligus ancaman bagi Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah. Berkembang tidaknya Koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada Perekonomian Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kesejahteraan Masyarakat pada khususnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melihat besarnya jumlah Koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat Perekonomian dengan berbasis pada Ekonomi kerakyatan menuju kedaulatan Sumber Daya Alam yang berkarakter.

Oleh sebab itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah selama periode Tahun 2017 – 2022 yang tertuang dalam Rencana Strategi ini. Strategi kelembagaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tahun 2020 target jumlah IKM yang menerapkan standarisasi mutu dan sertifikasi produk adalah 2 IKM dan Realisasi Tahun 2021 ada sebanyak 2 IKM yang mendapatkan fasilitasi mutu dan sertifikasi label halal dari MUI. Hal ini terealisasi karena dukungan bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara.

**SASARAN 17****Meningkatkan pembinaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi**

Dalam upaya peningkatan pembinaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program pembinaan dan pengembangan koperasi dan UKM yang berwawasan lingkungan, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM, program pengembangan industri kecil dan menengah, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program penataan struktur industri. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.22****Analisis Capaian Sasaran 17****Meningkatkan pembinaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase UMKM dan Koperasi yang dibina pemerintah daerah	Unit	3	3,90	130%	3	3	100%	
2	Persentase IKM yang dibina pemerintah daerah	Unit	2.307	2.307	100%	2.398	2.247	93,7%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Persentase UMKM dan Koperasi yang dibina pemerintah daerah adalah 3,90 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 130%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 3 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Persentase IKM yang dibina pemerintah daerah pada Tahun 2021 adalah 2.307 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 2.247 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 93,7%. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 17** sebesar 96,85% dengan Interpretasi **Baik**.

Persentase IKM yang dibina pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Tengah di Bidang Perindustrian terdapat peningkatan sebesar 3,8 %, pembinaan yang dilakukan berupa pendataan ke lokasi IKM dan pemberian fasilitasi bantuan peralatan dan bahan baku serta bantuan kemasan bagi produk pangan yang sudah mempunyai Label Halal dari MUI.

**SASARAN 18****Meningkatkan Akses Pemasaran Hasil UMKM, IKM dan Koperasi**

Dalam upaya peningkatan Akses Pemasaran Hasil UMKM, IKM dan Koperasi, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran, program pencegahan dan mitigasi bencana,





program kesiap-siagaan, program rehabilitasi dan rekonstruksi dan program pengembangan industri kecil dan menengah. Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
**Analisis Capaian Sasaran 18**  
**Meningkatkan Akses Pemasaran Hasil UMKM, IKM dan Koperasi**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan pameran/ promosi IKM	Kegiatan	2	3	150%	2	4	200%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Kegiatan pameran/ promosi IKM adalah 3 Kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja adalah 150 %. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 4 Kegiatan, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 200% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 18** sebesar 200%, dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

### SASARAN 19

#### Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam upaya peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Bahan Berbahaya ( B3 ) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ( B3 ), Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, Program Pengelolaan Persampahan.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.24**  
**Analisis Capaian Sasaran 19**  
**Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2020	Target	realisasi	Tahun 2021	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio cakupan pengawasan terhadap Amdal	%	58	48	80%	60	100	166,67%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Rasio cakupan pengawasan terhadap Amdel adalah 48 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 80 %. sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 100 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 166,67% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 19** sebesar 166,67 % dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Dalam menangani permasalahan tersebut di temukan beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1. Masih Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan;
2. Masih rendahnya kesadaran Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan;
3. Belum optimalnya pengelolaan sampah;



4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah;
5. Adanya pemanasan global yang terjadi di dunia.

Selain itu ada juga faktor pendorong yang menjadi penunjang kebersihan dalam penanganan masalah sebagai berikut:

- 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2 Adanya peraturan daerah nomor 6 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, peraturan Bupati Tapanuli Tengah nomor 71 tahun 2000 tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan serta komitmen sekolah adiwiyata dalam mengurangi sampah dan menciptakan sekolah yang berbudaya lingkungan;
- 3 Terbukanya peluang pendanaan dari kemitraan baik nasional maupun internasional;
- 4 Isu lingkungan menjadi isu global yang menjadi perhatian internasional;
- 5 Tumbuhnya kesadaran pemerhati dan komunitas peduli lingkungan hidup.

## SASARAN 20

### Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana

Dalam upaya peningkatan Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa Program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Penanggulangan Bencana.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.25**  
**Analisis Capaian Sasaran 20**  
**Penanggulangan Bencana dan Resiko Bencana**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio penanggulangan bencana	%	49,49	57,89	116,97%	52,90	150%	284%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Rasio penanggulangan bencana adalah 57,89 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 116,97%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 150 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 284 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 20** sebesar 284 % dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Isu strategis adalah Kondisi yang harus diperhatikan dan di kedepankan dalam Perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (Daerah/Masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi /kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya,



dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam hal ini, penanggulangan dan mitigasi bencana alam yakni program rehabilitasi hujan dan lahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan salah satu program untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim global di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dimasa pada musim penghujan telah terjadi peningkatan intensitas badai angin dan hampasan angin panas, bencana banjir tahunan dan tanah longsor sedangkan pada musim kemarau terjadi kekeringan. Hal ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah beserta seluruh lapisan masyarakatnya untuk dapat mengurangi dampak dari perubahan iklim global.

Menurut UU no 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis, sedangkan Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan, pembangunan, yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi, dan Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.

***Misi Keenam: Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya yang Lestari***

**SASARAN 21**

**Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama**

Dalam upaya peningkatan Kerukunan Umat Beragama, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakata, Program Kerja Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah, Program Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.26**  
**Analisis Capaian Sasaran 21**  
**Meningkatkan Kerukunan Umat Beragama**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2020	Target	realisasi	Tahun 2021	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase berkurangnya permasalahan isu SARA di Kabupaten Tapanuli Tengah	%	100	100	100%	100	98	98%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Persentase berkurangnya permasalahan isu SARA di



Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 100% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 98 %, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 98 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 21** sebesar 98 %, dengan Interpretasi **Baik**

- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah  
Tujuan: untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, mengawasi penanganan konflik sosial di daerah serta merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan anggota tim berjumlah 22 (Dua puluh dua) orang.  
Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja sama dengan Kapolres Tapanuli Tengah, Komandan Kodim 0211/TT, Kajari Sibolga, Ketua FKUB Tapanuli Tengah.
- Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama melalui Pemberdayaan Forum Kerukunaan Umat Beragama (FKUB)  
Tujuan: untuk meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Tapanuli Tengah melalui pemberdayaan FKUB.
- Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM)  
Tujuan: untuk mengantisipasi tumbuhnya aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat serta pencegahan konflik sosial. Sasaran: Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah.

## SASARAN 22

### Meningkatnya Pelestarian Budaya, Situs dan Cagar Budaya

Dalam upaya peningkatan Pelestarian Budaya, Situs dan Cagar Budaya, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pendidikan dan Dinas Pariwisata. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata,.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.27**  
**Analisis Capaian Sasaran 22**  
**Meningkatnya Pelestarian Budaya, Situs dan Cagar Budaya**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kegiatan	6	0	0%	6	4	66,67%	
2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	1	0	0%	1	0	0%	
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Unit	1	1	100%	1	1	100%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 Realisasi pada Indikator Sasaran Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah 6 Kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 4 Kegiatan, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 66 ,67 % Selanjutnya capaian indikator sasaran Sarana penyelenggaraan seni dan budaya pada tahun 2021 adalah 1 Unit dengan persentase pencapaian



kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja 0% Selanjutnya capaian indikator sasaran Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun 2021 adalah 1 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 1 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja 100%. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 22** sebesar 83,34% dengan Interpretasi **Baik**.

Tujuan Program Pengembangan Nilai Budaya untuk memberikan layanan sebagai usaha untuk mengembangkan nilai budaya yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah, adapun kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan, Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan.

### SASARAN 23

#### Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan

Dalam upaya peningkatan nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.28**  
**Analisis Capaian Sasaran 23**  
**Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan	Kegiatan	2	5	250 %	2	3	150%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah kegiatan yang mendukung peningkatan nilai-nilai persatuan dan kebangsaan adalah 5 Kegiatan dengan persentase pencapaian kinerja adalah 250 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 3 Kegiatan, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 150 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 23** sebesar 150% dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Pemberdayaan Forum Pembeuran Kebangsaan di Kabupaten Tapanuli Tengah  
Tujuan kegiatan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif di Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan



Dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan Kabupaten Tapanuli Tengah, maka Satuan Polisi Pamong Praja membuat kegiatan Peningkatan Kerja Sama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

**Misi Ketujuh: Menciptakan Dunia Usaha dan Investasi yang Adil dan Pro Rakyat**

**SASARAN 24**

**Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industri pengolahan dan kreatif**

Dalam upaya peningkatan sarana dan prasarana pendukung untuk industri, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pengendalian Izin Usaha Industri, Program Pengolahan Sistem Industri Nasional, Program Perencanaan dan Pengembangan Industri, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.29**  
**Analisis Capaian Sasaran 24**  
**Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung**  
**untuk industri pengolahan dan kreatif**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Cakupan bina kelompok pengrajin	Kelompok	18	0	0%	19	1	5,26%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Cakupan bina kelompok pengrajin adalah 0 Kelompok dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0 %. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 1 Kelompok, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 5, 26 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 24** sebesar 5,26 % dengan Interpretasi **Kurang**.

**SASARAN 25**

**Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha**

Dalam upaya peningkatan jumlah investasi dan dunia usaha, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Ketenagakerjaan.

Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program peningkatan kesempatan kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:



**Tabel 3.30**  
**Analisis Capaian Sasaran 25**  
**Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah PMA	Perusahaan	5	1	20%	5	3	60%	
2	Jumlah PMDN	Perusahaan	15	27	180%	16	102	638%	
3	Jumlah jenis perijinan yang dilayani	Jenis	100	60	60%	101	3925	3886%	
4	Jumlah jenis non perijinan yang dilayani	Jenis	23	10	43,48%	24	1	4%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah PMA adalah 1 Perusahaan dengan persentase pencapaian kinerja adalah 20%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 3 Perusahaan, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 60%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah PMDN pada Tahun 2021 adalah 27 Perusahaan dengan persentase pencapaian kinerja adalah 180%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 102 Perusahaan, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 638% Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah jenis perijinan yang dilayani pada tahun 2021 adalah 60 Jenis dengan persentase pencapaian kinerja adalah 60%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 3925 Jenis, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 3886% Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah jenis non perijinan yang dilayani pada Tahun 2021 adalah 10 Jenis dengan persentase pencapaian kinerja adalah 43,48%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 1 Jenis, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 4% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 25** sebesar 1147% dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Dalam menghadapi tantangan atau kendala tersebut di atas maka perlu dilakukan strategi pemecahan masalaha yaitu :

1. Mengikuti pelatihan-pelatihan (diklat, bimtek, sosialisasi, seminar atau loka karya) baik bersifat teknis dan administratif, baik melalui anggaran di OPD yang diajukan ataupun melalui koordinasi BKD/Instansi teknis lainnya.
2. Pendataan/inventaris barang serta penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKB) dengan memperhatikan rencana atau kegiatan yang akan dilakukan dan analisa kebutuhan bidang atau bagian dalam melaksanakan pekerjaan rutin.
3. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama, baik lintas vertikal dan horizontal unit kerja dan untuk tingkat pemerintah atasan (Pemerintah Pusat/Kementerian dan Provinsi), sehingga kedepannya program/kegiatan yang berjalan dapat saling menyambung /saling mengisi dan berkelanjutan.
4. Melakukan Sosialisasi/Bimbingan Teknis bagi masyarakat/pengusaha dan stakeholder terkait untuk optimalisasi pemakaian OSS dan LKPM online.

**SASARAN 26****Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal**

Dalam upaya peningkatan peluang kerja bagi penduduk lokal, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Ketenagakerjaan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program pembinaan, penetapan dan perluasan kesempatan kerja.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.31**  
**Analisis Capaian Sasaran 26**  
**Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	94,84	70,90	74,79%	94,91	75,5	79%	
2	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,16	7,54	146%	5,9	7,24	142%	
3	Tingkat produktivitas tenaga kerja daerah	Rp/ Tenaga Kerja	12.620 .000	6.937. 229,-	56,97%	13.560 .000,-	7.284. 090,-	53,7%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 70,90% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 74,79%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 75,5% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 79% Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2021 adalah 7,54% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 146%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 7,24%, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 142% Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat produktivitas tenaga kerja daerah pada Tahun 2021 adalah Rp. 6.937.229,- dengan persentase pencapaian kinerja adalah 56,97%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah Rp. 7.284.090,- dengan persentase pencapaian kinerja adalah 53,7%, Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 26** sebesar 91,57% dengan Interpretasi **Baik**.

Permasalahan Eksternal Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Tengah:

**1. Kondisi Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah**

- Tingkat Pengangguran Tapanuli Tengah 7,54%, namun 8,83% pencari kerja belum berpengalaman dan merupakan pencari kerja yang berpendidikan SMP dan SMA, sedangkan Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah yang berpendidikan Sarjana hanya sebesar 5,35%.
- Minimnya kualitas dan kuantitas Lembaga Pelatihan Kerja.

**2. Implikasi/Dampak**

- Rendahnya kualifikasi dan kompetensi Tenaga Kerja/SDM Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Rendahnya Produktivitas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.





- c. Rendahnya Bargaining Position ( Posisi Tawar ) Tenaga Kerja Daerah yang juga berpengaruh pada tingkat perolehan hak – hak Tenaga Kerja.
- d. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja.
- e. Tinggungnya tingkat perselisihan Hubungan Industri.

### 3. Solusi

- a. Peningkatan kompetensi dan produktivitas melalui pelatihan kerja.
- b. Peningkatan Lembaga pelatihan kerja Pemerintah/Swasta.
- c. Mendorong tumbuhnya Wirausaha baru.
- d. Mewujudkan Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif terhadap perlindungan Tenaga Kerja
- e. Penyebarluasan informasi terkait Undang – undang Ketenagakerjaan dan peluang kerja.
- f. Fasilitasi pencari kerja dan penempatan kerja.

### SASARAN 27

#### Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial yang harmonis

Dalam upaya peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Ketenagakerjaan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pengembangan Hubungan Industri dan jaminan sosial tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja, program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenaga kerjaan, program pembinaan, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja .

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.32**  
**Analisis Capaian Sasaran 27**  
**Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja dan**  
**Hubungan Industrial yang harmonis**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	7	16,21	231,57%	6,36	20	313%	
2	Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan	%	90	100	111%	90,99	100	109%	
3	Tingkat peraturan perusahaan yang di sahkan	%	71	51	71,83%	73	78	106%	
4	Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan	%	24	5,4	22,57%	25	25	100%	
5	Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek	%	100	76	76%	100	90	90%	
6	Jumlah pekerja buruh yang menjadi anggota Jamsostek	Orang	4.400	6.625	150,57%	4450	16806	377%	
7	Tingkat perselisihan hubungan industrial	%	1	0,5	50%	0,9	0,5	55%	
8	Tingkat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah	Jumlah Demons trasi	0	0	0%	0	0	0%	
9	Tingkat LKS biparted di perusahaan	%	18	8	44,44%	20	10	50%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Tingkat keselamatan dan perlindungan tenaga kerja adalah



16,21% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 231,57%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 20% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 313%, selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat kepatuhan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan pada Tahun 2021 adalah 100% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 111%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 100% dengan pencapaian kinerja 109%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat peraturan perusahaan yang di sahkan pada tahun 2021 adalah 51% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 71,83%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 78% dengan pencapaian kinerja 106%, selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat perjanjian kerja sama yang didaftarkan pada tahun 2021 adalah 5,4% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 22,57%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 25% dengan pencapaian kinerja 100% Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat perusahaan yang menjadi peserta Jamsostek pada tahun 2021 adalah 76% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 76%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 90% dengan pencapaian kinerja 90%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah pekerja buruh yang menjadi anggota Jamsostek pada tahun 2021 adalah 6625 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 150,57%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 4450 orang dengan pencapaian kinerja 377% Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat perselisihan hubungan industrial pada tahun 2021 adalah 0,5% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 50%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0,5% dengan pencapaian kinerja 55%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah pada tahun 2021 adalah 0 Jumlah Demonstrasi dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Jumlah Demonstrasi dengan pencapaian kinerja 0%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Tingkat LKS biparted di perusahaan pada tahun 2021 adalah 8% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 44,44%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 10% dengan pencapaian kinerja 50% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 27** sebesar 133,33% dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

**Misi Kedelapan: Mengembangkan Potensi Wisata secara serius menuju Peningkatan Ekonomi Rakyat**

#### SASARAN 28

#### Meningkatnya Destinasi Wisata

Dalam upaya peningkatan Destinasi Wisata, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pariwisata. Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program Pengolahan Destinasi Pariwisata.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.33**  
**Analisis Capaian Sasaran 28**  
**Meningkatnya Destinasi Wisata**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah destinasi wisata yang dibangun	Unit	2	0	0%	1	0	0%	



Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah destinasi wisata yang dibangun adalah 0 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 0 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 28** sebesar 0%, dengan Interpretasi **Tidak ada data.**

### SASARAN 29

#### Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman)

Dalam upaya peningkatan Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman), Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pariwisata.

Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.34**  
**Analisis Capaian Sasaran 29**  
**Meningkatnya Jumlah Wisatawan Nusantara (Wisnu) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah Wisatawan Mancanegara	Jiwa	218	0	0%	232	0	0%	
2	Jumlah Wisatawan Nusantara	Jiwa	286.910	332.301	116%	306.037	371.132	111%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Jumlah Wisatawan Mancanegara adalah 0 Jiwa dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Jiwa, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah Wisatawan Nusantara pada tahun 2021 adalah Jiwa dengan persentase pencapaian kinerja adalah 332.301. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 371.132 Jiwa, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 111 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 29** sebesar 55,50 % dengan Interpretasi **Cukup.**

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata merupakan suatu program yang bertujuan untuk mempromosikan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Daerah tujuan wisata, Pelaksanaan program ini dilaksanakan dengan berbagai kegiatan yang meliputi:

1. Pengadaan Media Pendukung Kepariwisataaan
2. Mengikuti Expo /Pameran didalam dan luar daerah
3. Fasilitas promosi pariwisata melalui seni dan budaya dalam dan luar daerah
4. Festival Pesona Wisata Kabupaten Tapanuli Tengah
5. Promosi Pariwisata melalui Media Cetak dan Elektronik.

**Misi Kesembilan: Tersedianya Kebutuhan Petani dan Nelayan yang Cukup dan Memadai****SASARAN 30****Meningkatnya Hasil Produksi dari sektor Pertanian dan sektor Kelautan**

Dalam upaya peningkatan Hasil Produksi dari sektor Pertanian dan sektor Kelautan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Yang melaksanakan beberapa program, diantaranya yaitu, Program pengendalian kesehatan dan kesehatan Masyarakat Veteriner ,Program pengendalian dan peanggulangan Bencana pertanian , Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Penyuluh Pertanian program pengelolaan perikanan dan budidaya, program pengelolaan perikanan tangkap .

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.35**  
**Analisis Capaian Sasaran 30**  
**Meningkatnya Hasil Produksi dari sektor**  
**Pertanian dan sektor Kelautan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanaman Pangan:	Ton/Ha/(GKG)	4,72	4,13	87,50%	4,78	4,13	86,40	
	- Padi								
2	- Jagung	Ton/Ha	4,80	2,64	55%	4,91	2,64	53,77	
	Perkebunan:	Ton/Ha	10,20	19,32	189,41%	10,45	19,32	184,88	
3	- Kelapa Sawit	Ton/Ha	0,69	0,95	137,68%	0,70	0,95	135,71	
	- Karet	Ton	50.645	41.453	82%	51,92	11,526	23%	
3	Perikanan:	Ton	378.309	828	0,22%	194,12	239	87%	
	- Perikanan Tangkap								
	- Perikanan Budidaya								

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Tanamam pangan padi adalah 4,13 Ton dengan persentase pencapaian kinerja adalah 87,50%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 4,13 ton, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 86,40% Selanjutnya capaian indikator sasaran Tanaman pangan jagung pada Tahun 2021 adalah 2,64 ton dengan persentase pencapaian kinerja adalah 55%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 2,64 ton, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 53,77%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Perkebunan Kelapa sawit pada Tahun 2021 adalah 19,32 ton dengan persentase pencapaian kinerja adalah 189,41%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 19,32 ton, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 184,88% Selanjutnya capaian indikator sasaran Perkebunan Karet pada Tahun 2021 adalah 0,95 ton dengan persentase pencapaian kinerja adalah 137,68%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 0,95 ton, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 135,71% Selanjutnya capaian indikator sasaran Perikanan Tangkap pada Tahun 2021 adalah 41.453 ton dengan persentase pencapaian kinerja adalah 82%. sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 11.526 ton, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 23% Selanjutnya capaian indikator sasaran Perikanan Budidaya pada Tahun 2021 adalah 828 ton dengan



persentase pencapaian kinerja adalah 0,22%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 239 ton, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 87% Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 30** sebesar 95,13% dengan Interpretasi **Baik**.

Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan daerah agraris yang sesuai untuk pengembangan komoditi pertanian. Hampir keseluruhan tanaman pangan dan hortikultura di dataran tinggi dapat dikembangkan di Daerah. namun hingga saat ini pengelolaannya masih bersifat tradisional dan orientasinya pun masih dalam skala kecil. Selain itu masyarakat telah terbiasa bahkan berbudaya untuk menanam padi sebagai tanaman utama walaupun hasilnya jauh dari produksi rata – rata.

### SASARAN 31

#### Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian dan Kelautan

Dalam upaya peningkatan Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian dan Kelautan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa Program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu,

Program peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan, Program pengembangan perikanan tangkap, program pengembangan budi daya perikanan, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Program Perizinan Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.36**  
**Analisis Capaian Sasaran 31**  
**Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sektor Pertanian dan Kelautan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase jaringan irigasi tersier kondisi baik	%	85	60	70,59%	85	60	70,59	
2	Persentase jalan desa nelayan kondisi baik	%	70	60	85,71%	70	60	85,71	
3	Persentase alsintan dalam kondisi baik	%	65	60	92,31%	65	60	92,31	
4	Persentase peningkatan alat tangkap nelayan	%	70	0	0%	0	0	0%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Persentase jaringan irigasi tersier kondisi baik adalah 60% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 70,59%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 60%, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 70,59%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Persentase jalan desa nelayan kondisi baik pada Tahun 2021 adalah 60% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 85,71%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 60% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 85,71%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Persentase alsintan dalam kondisi baik pada Tahun 2021 adalah 60% dengan persentase



pencapaian kinerja adalah 92,31%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 60% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 92,31%. selanjutnya capaian indikator sasaran Persentase peningkatan alat tangkap nelayan pada tahun 2021 adalah 70% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 31** sebesar 82,87 % dengan Interpretasi **Baik**.

Pembangunan pertanian merupakan rangkaian berbagai upaya mengembangkan kapasitas masyarakat pertanian agar mampu melaksanakan kegiatan ekonomi produktif secara mandiri dan selanjutnya mampu memperbaiki kehidupannya sendiri. Dalam hal ini pihak aparat berperan sebagai stimulator, motivator, dan fasilitator yang mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi dan sosial para petani, agar dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraannya.

Sasaran "Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pertanian dan Perkebunan". Sasaran ini didukung oleh 1 ( satu ) indikator kinerja sasaran dengan 1 ( satu ) Program yaitu "Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.

### SASARAN 32

#### Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan

Dalam upaya peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Ketahanan Pangan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Penyuluhan Pertanian.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.37**

#### Analisis Capaian Sasaran 32

#### Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluh dan Lembaga Penyuluhan

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	%	80	0	0	80	0	0%	
2	Jumlah BPP	Kantor	16	9	56,25%	20	9	45 %	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat adalah 0% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0%, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah BPP pada tahun 2021 adalah 9 Kantor dengan persentase pencapaian kinerja adalah 56,25 %. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 9 Kantor, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 45 % Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 32** sebesar 45% dengan Interpretasi **Kurang**

**SASARAN 33****Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan**

Dalam upaya peningkatan Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian,

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.38**  
**Analisis Capaian Sasaran 33**  
**Terpenuhinya Jaminan Sosial bagi Petani dan Nelayan**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial	%	50	40	100%	60	40	66,67 %	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada tahun 2021 realisasi pada Indikator Sasaran Persentase petani dan nelayan yang memiliki jaminan sosial adalah 40 % dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 40%, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 66,67 %. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 33** sebesar 66,67 %, dengan Interpretasi **Baik**.

**Misi Kesepuluh: Terwujudnya Rumah Sehat bagi Warga Miskin dan Santunan Kematian bagi Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah**

**SASARAN 34****Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta terwujudnya penyediaan perumahan dan hunian vertical (rusunawa dan resunami) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) adalah rumah tinggal yang tidak memenuhi standard layak huni. Rumah yang memenuhi standard layak huni diantaranya :

1. Desain : Luas rumah minimal 3,5 m<sup>2</sup> / orang dan minimum ruangan
2. Ketahanan : Kontruksi dan spesifikasi material dapat mencegah dampak terburuk dari bencana yang mungkin terjadi.
3. Kepemilikan tanah : Hak kepemilikan tanah dan bangunan yang sah seperti sertifikat tanah atau surat keterangan hak milik dari pemerintah pusat
4. Air Bersih : ada akses air bersih yang aman dan mencukupi untuk kebutuhan minum, memasak serta kebutuhan pribadi
5. Sanitasi : Akses ke toilet komunitas memiliki jumlah toilet yang cukup dekat dengan rumah dan memungkinkan untuk dijangkau dengan cepat dan aman setiap waktu.

Dalam upaya penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Kabupaten Tapanuli Tengah menjalankan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman.



Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program lingkungan sehat perumahan, Program Pengembangan Perumahan, Program Kawasan Permukiman serta permukiman kumuh, Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.39****Analisis Capaian Sasaran 34**

**Berkurangnya jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta terwujudnya penyediaan perumahan dan hunian vertical (rusunawa dan resunami) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022	Ket.
			Target	realisasi		Target	realisasi		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Unit	19.306	13.739	71,15%	100	100	100%	
2	Jumlah Rusunawa	Unit	1	0	0%	1	0	0%	
3	Jumlah perumahan nelayan	Unit	322	0	0%	50	0	0%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni adalah 13.739 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 71,15%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 100 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 100% Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah Rusunawa pada tahun 2021 adalah 0 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah perumahan nelayan pada tahun 2022 adalah 0 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 34** sebesar 33,33% dengan Interpretasi **Kurang**.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam rangka pencapaian sasaran mengetaskan RTLH di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah dengan :

1. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Tapanuli Tengah;
2. Sosialisasi tentang Rumah Layak Huni sehingga kelompok Rumah Tangga menjadikan pembangunan dan perbaikan rumah menjadi prioritas utama;
3. Penguatan kalobarasi lintas sektoral.

**SASARAN 35****Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kumuh**

Kualitas lingkungan tempat permukiman menyelenggarakan upaya pada beberapa aspek perlindungan dan penyehatan di tempat permukiman agar para penghuni dan orang beraktifitas di tempat permukiman mendapatkan jaminan keamanan.

Dalam upaya peningkatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kumuh, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum.





Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.40**  
**Analisis Capaian Sasaran 35**  
**Meningkatnya Penyehatan Lingkungan Pemukiman Kumuh**

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Menurunnya jumlah luasan kawasan kumuh	Ha	25,29	89,29	353,06%	14	0	0%	
2	Jumlah rumah tangga bersanitasi	%	21,25	99,92	470%	0,75	0	0%	
3	Meningkatnya pelayanan air minum	%	90,10	98,85	109,71%	8,97	0	0%	
4	Meningkatnya jumlah MCK Umum	Unit	63	82	130%	10	0	0%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Menurunnya jumlah luasan kawasan kumuh adalah 89,29 Ha dengan persentase pencapaian kinerja adalah 353,06%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 0 Ha, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%,selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah rumah tangga bersanitasi pada Tahun 2021 adalah 99,92% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 470%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 0% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0% Selanjutnya capaian indikator sasaran Meningkatnya pelayanan air minum pada Tahun 2021 adalah 98,85% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 109,71%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 0% dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0% Selanjutnya capaian indikator sasaran Meningkatnya jumlah MCK Umum pada Tahun 2021 adalah 82 Unit dengan persentase pencapaian kinerja adalah 130%. Sedangkan pada tahun 2022 realisasi adalah 0 Unit, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 0%. Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 35** sebesar 0%, dengan Interpretasi **Tidak Ada Data**.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Air Minum Layak adalah :

- Syarat fisik : bening atau jernih tidak meninggalkan endapan, tidak berbau, tidak berasa (tawar) dan memiliki suhu dibawah suhu udara luar atau suhu ruangan yakni antara 10-25 derajat celsius
- Syarat Kimiawi : syarat ini berkaitan dengan derajat keasaman, kandungan mineral, dan bahan – bahan kimia lain dalam air minum
- Syarat Mikrobiologi : air minum harus bebas dari segala kuman penyebab penyakit.

Sehingga program pengembangan air minum di Kabupaten Tapanuli Tengah hanya melalui pengembangan air minum perkotaan dan perdesaan. Dalam upaya peningkatan akses air minum, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan mendukung sasaran tersebut.

Sektor air minum, sanitasi dan rumah layak huni menjadi salah satu sektor yang dianggap berperan penting dalam mencapai kualitas hidup masyarakat Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari Nawacita pada tujuan yang kelima yaitu “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”. Kementerian PUPR menyikapi target tersebut dengan menyusun rencana strategis kementerian PUPR yaitu “Universal akses 100-0-100 di Tahun 2012”.



Akses rumah tangga terhadap sarana pengolahan air limbah domestik. dimana akses sanitasi layak adalah masyarakat mempunyai sarana limbah yang memenuhi standarisasi pengolahan air limbah domestik. Dalam hal masyarakat tidak lagi buang air besar (BAB) di sembarangan tempat melainkan di MCK RT nya masing – masing.

Syarat akses sanitasi dikatakan layak yaitu :

1. Mempunyai jamban sehat leher angsa baik perorangan atau komunal;
2. Mempunyai media pengolahan air limbah yang menghasilkan sisa buangan yang dapat dibuang ke badan air.

### SASARAN 36

#### Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin

Dalam upaya peningkatan santunan kematian bagi masyarakat miskin, Kabupaten Tapanuli Tengah menjalan beberapa Program mendukung sasaran tersebut yang berintegrasi antar beberapa OPD terkait, yakni Dinas Sosial. Yang melaksanakan beberapa Program, diantaranya yaitu, Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial.

Pada tabel dibawah dapat dilihat pencapaian sasaran per indikator sasaran , sebagai berikut:

**Tabel 3.41**  
**Analisis Capaian Sasaran 36**

#### Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin

No	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja	Ket.
			Target	realisasi	Tahun 2021	Target	realisasi	Tahun 2022	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
1	Angka kemiskinan	Orang	22.325	30.915	138,48%	21.878	30.645	140%	
2	Jumlah masyarakat miskin penerima santunan	Orang	4.230	10.982	259,62%	4.225	7.612	180,17%	

Pada tabel diatas, dijelaskan bahwa pada Tahun 2021 realisasi Angka kemiskinan adalah 30.915 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 138,48%. Sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 30.645 orang, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 140% Selanjutnya capaian indikator sasaran Jumlah masyarakat miskin penerima santunan pada Tahun 2021 adalah 10.982 orang dengan persentase pencapaian kinerja adalah 259,62%. sedangkan pada Tahun 2022 realisasi adalah 7.612 orang, dengan persentase pencapaian kinerja adalah 180,17 Maka pencapaian kinerja pada **sasaran 36** sebesar 160,09% dengan Interpretasi **Sangat Baik**.

Dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah ,beberapa permasalahan yang sering dihadapi antara lain:

1. Masih ada perbedaan data dan persepsi diantara Stakeholder terkait khususnya dalam hal menginterpretasikan Masyarakat / Penduduk miskin dan Rumah Tangga /KK miskin yang menjadi sasaran Program /Kegiatan baik secara konsepsional maupun praktek dilapangan termasuk perbedaan fokus/orientasi pada penanggulangan kemiskinan ;
2. Belum optimalnya koordinasi antara lembaga pemerintah di pemerintahan dunia usaha, LSM dan masyarakat madani dalam bermitra dan bekerja sama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja;



3. Perlu adanya update data terpadu kesejahteraan sosial sesuai kondisi yang ada;
4. Masih adanya kurang pemahaman bahwa penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah sehingga tidak dapat memberikan akses dan respon yang memadai ;
5. TKPKD yang terbentuk belum sepenuhnya dapat berfungsi secara aktif dan partisipatif.

Mengingat kondisi kemiskinan yang bersifat multi dimensi , maka memerlukan rencana koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan yang langkah- langkah ditempuh sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi antar Stakeholder terkait, Khususnya OPD yang tergabung dalam TKPKD kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan semakin efektif;
- b. Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk menunjang peningkatan kinerja TKPKD Kabupaten Tapanuli Tengah melalui APBD dan sumber lain;
- c. Mengembangkan kerja sama dengan kalangan profesional, dunia usaha (pemilik modal) dan tokoh-tokoh masyarakat lokal /lembaga lain dalam program –program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya gerakan bersama.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana amanah Peraturan Perundang-undangan adalah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja atas penggunaan anggaran Tahun 2022 untuk mewujudkan “ Terwujudnya Masyarakat Tapanuli Tengah yang Berkarakter, Mandiri, Berakhlak dan Berkeadilan yang Sejahtera ”.

Laporan Kinerja Tahun 2022 terdiri dari 36 sasaran dan 98 indikator sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Target Kinerja Bupati yang tertuang pada Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2017 - 2022, secara umum bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah berusaha mewujudkan capaian sasaran kinerja yang dimaksud dengan maksimal.

Pencapaian Sasaran Kinerja secara analisis pada Indikator Sasaran sudah berdasarkan evaluasi oleh Kementerian PAN RB terdapat keselarasan pada beberapa Indikator Sasaran dengan tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan Visi, Misi Tapanuli Tengah telah diupayakan melalui langkah-langkah kebijakan, dan strategi yang dilakukan. Secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk dalam kategori **BAIK**. Berikut simpulan kinerja dan permasalahan per sasaran, yakni :

1. Sasaran 1 yakni “Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan kinerja pengelolaan pelayanan publik yang didukung sarana dan prasarana aparatur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)”, persentase capaian **sasaran 1** sebesar 82,08%, dengan interpretasi **Baik**.
2. Sasaran 2 yakni “Meningkatnya peran kelembagaan perangkat daerah” dengan persentase capaian , sasaran sebesar 100%, persentase capaian **sasaran 2** sebesar 100%, dengan interpretasi **Baik**.
3. Sasaran 3 yakni “Tersedianya regulasi yang diperlukan masyarakat” dengan indikator sasaran Keberadaan Perda terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Perundang-undangan, dan **sasaran 3** sebesar 600 %, dengan interpretasi **Sangat Baik**
4. Sasaran 4 yakni “Terpelihara dan terbangunya infrastruktur sosial, ekonomi dan pemerintahan” persentase capaian **sasaran 4** sebesar 182,38 %, dengan interpretasi **Sangat Baik**.
5. Sasaran 5 yakni “Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar perumahan dan kawasan pemukiman (Air minum, air bersih, sanitasi, sarana prasarana dan utilitas kawasan pemukiman” persentase capaian **sasaran 5** sebesar 87,72 %, dengan interpretasi **Baik**.
6. Sasaran 6 yakni “Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat” persentase capaian **sasaran 6** sebesar 99 %, dengan interpretasi **Baik**.



7. Sasaran 7 yakni “Menurunnya prevalensi kekurangan Giji” dengan indikator sasaran Prevalensi Balita giji buruk capaian **sasaran 7** sebesar 100 %, dengan interprestasi **Baik**.
8. Sasaran 8 yakni “Meningkatnya jaminan kesehatan masyarakat” dengan indikator sasaran Persentase penduduk yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), capaian **sasaran 8** sebesar 167 %, dengan interprestasi **Sangat Baik**.
9. Sasaran 9 yakni “Meningkatnya kualitas layanan keluarga berencana” persentase capaian **sasaran 9** sebesar 25,67 %, dengan interprestasi **Kurang**
10. Sasaran 10 yakni “Meningkatnya keberdayaan, kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak” persentase capaian **sasaran 10** sebesar 91 %, dengan interprestasi **Baik**.
11. Sasaran 11 yakni “Meningkatnya pemerataan aksesibilitas dan kualitas pendidikan formal, non formal dan informal” persentase capaian **sasaran 11** sebesar 99,56 %, dengan interprestasi **Baik**.
12. Sasaran 12 yakni “Tersedianya beasiswa berprestasi bagi masyarakat yang kurang mampu” capaian sasaran 1.115 %, dengan interprestasi **Sangat Baik**.
13. Sasaran 13 yakni “Terwujudnya pengintegrasian pendidikan karakter/ akhlak (revolusi mental)” capaian sasaran 100%, dengan interprestasi **Baik**.
14. Sasaran 14 yakni “Meningkatnya partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan” capaian sasaran 0.15 %, dengan interprestasi **Data tidak ada**.
15. Sasaran 15 yakni “Peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga” capaian sasaran 0,08 %, dengan interprestasi **Data tidak ada**.
16. Sasaran 16 yakni “Meningkatkan daya saing pelaku ekonomi kelompok UMKM, IKM dan Koperasi yang berbasis potensi lokal” persentase capaian **sasaran 16** sebesar 271,29 %, dengan interprestasi **Sangat Baik**.
17. Sasaran 17 yakni “Meningkatkan pembinaan oleh pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM, IKM dan Koperasi” persentase capaian **sasaran 17** sebesar 96,85 %, dengan interprestasi **Baik**.
18. Sasaran 18 yakni “Meningkatkan akses pemasaran hasil industri UMKM, IKM dan Koperasi” capaian **sasaran 18** sebesar 200 %, **Sangat Baik**.
19. Sasaran 19 yakni “Peningkatan kualitas lingkungan hidup” capaian **sasaran 19** sebesar 166,67 %, dengan interprestasi **Baik**.
20. Sasaran 20 yakni “Penanggulangan bencana dan resiko bencana alam” capaian **sasaran 20** sebesar 284 %, dengan interprestasi **Sangat Baik**.
21. Sasaran 21 yakni “Meningkatnya kerukunan umat beragama” capaian **sasaran 21** sebesar 98 %, dengan interprestasi **Baik**
22. Sasaran 22 Yakni “Meningkatnya pelestarian budaya, situs dan cagar budaya” persentase capaian **sasaran 22** sebesar 83,34 %, dengan interprestasi **Baik**



23. Sasaran 23 yakni "Meningkatnya nilai-nilai persatuan dan nilai-nilai kebangsaan" capaian **sasaran 23** sebesar 150%, dengan interpretasi **Sangat Baik**.
24. Sasaran 24 yakni "Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk industri pengolahan dan kreatif" capaian **sasaran 24** sebesar 5,26 %, dengan interpretasi **Data tidak ada**.
25. Sasaran 25 yakni "Meningkatnya jumlah investasi dan dunia usaha" persentase capaian **sasaran 25** sebesar 1147 %, dengan interpretasi **Sangat Baik**
26. Sasaran 26 yakni "Meningkatnya peluang kerja bagi penduduk lokal" persentase capaian **sasaran 26** sebesar 91,57 %, dengan interpretasi **Baik**.
27. Sasaran 27 yakni "Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan hubungan industrial yang harmonis" persentase capaian **sasaran 27** sebesar 133,33 %, dengan interpretasi **Sangat Baik**.
28. Sasaran 28 yakni "Meningkatnya destinasi wisata" capaian sasaran 0%, dengan interpretasi **Data tidak ada**.
29. Sasaran 29 yakni "Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara (wisnu) dan wisatawan mancanegara (wisman)" persentase capaian **sasaran 29** sebesar 55,20 %, dengan interpretasi **Cukup**.
30. Sasaran 30 yakni "Meningkatnya hasil produksi dari sektor pertanian dan sektor kelautan" persentase capaian **sasaran 30** sebesar 95,13 %, dengan interpretasi **Baik**.
31. Sasaran 31 yakni "Meningkatnya sarana dan prasarana sektor pertanian dan sektor kelautan" persentase capaian **sasaran 31** sebesar 82,87 %, dengan interpretasi **Baik**.
32. Sasaran 32 yakni "Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluh dan lembaga penyuluhan" persentase capaian **sasaran 32** sebesar 45 %, dengan interpretasi **Kurang**
33. Sasaran 33 yakni "Terpenuhinya jaminan sosial bagi petani dan nelayan" capaian sasaran 66,67 %, dengan interpretasi **Baik**.
34. Sasaran 34 yakni "Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) serta terwujudnya penyediaan perumahan dan hunian vertikal (rusunawa dan rusunami) bagi masyarakat berpenghasilan rendah" persentase capaian **sasaran 34** sebesar 33,33 %, dengan interpretasi **Kurang**.
35. Sasaran 35 yakni "Meningkatnya penyehatan lingkungan pemukiman kumuh" persentase capaian **sasaran 35** sebesar 0%, dengan interpretasi **Data tidak ada**
36. Sasaran 36 yakni "Tersedianya santunan kematian bagi masyarakat miskin" persentase capaian **sasaran 36** sebesar 160,09 %, dengan interpretasi **Sangat Baik**.



Dari uraian dan analisis serta evaluasi atas pencapaian 36 sasaran dan 98 indikator sasaran, tersirat secara jelas bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah berusaha mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan bertekad membangun sebuah sistem pertanggung jawaban. Rata - rata secara keseluruhan, tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dari 36 sasaran dan 98 indikator sasaran adalah sebesar **169,88 %** dengan nilai interpretasi rata-rata yakni **Sangat Baik**.

#### 4.2 Rekomendasi

Namun demikian harus diakui bahwa dalam rangka perbaikan kinerja kedepan, ada beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian yang lebih serius. agar pencapaian kinerja Kabupaten Tapanuli Tengah dapat sesuai target kinerja atau lebih baik, dengan melakukan beberapa perubahan terhadap perencanaan kinerja.

Berbagai kendala, hambatan serta keberhasilan dalam pelaksanaan tugas yang terlihat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022 ini akan memacu semangat seluruh jajaran ASN Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meraih sukses dimasa yang akan datang. Semoga Laporan ini menjadi kajian bagi Pemerintah Pusat atau provinsi, agar Kabupaten Tapanuli Tengah dapat melaksanakan amanah masyarakat dengan baik.

Bahwa terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita - cita berbangsa dan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah pelaksana kebijakan Bupati dalam melaksanakan visi misinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sehingga terwujudlah masyarakat yang unggul dan sejahtera.

Pandan,       Maret 2023

**Pj.BUPATI TAPANULI TENGAH**

**ELFIN ELYAS**